

**PENDIDIKAN DEMOKRASI ISLAMI
MENURUT KH. ABDURRAHMAN WAHID**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

RISKY PRISAL ADITYA

NIM. 2020100233

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PENDIDIKAN DEMOKRASI ISLAMI
MENURUT KH. ABDURRAHMAN WAHID**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

RISKY PRISAL ADITYA

NIM. 2020100233

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PENDIDIKAN DEMOKRASI ISLAMI
MENURUT KH. ABDURRAHMAN WAHID**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

RISKY PRISAL ADITYA

NIM. 2020100233

PEMBIMBING I

Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe, M.A.
NIP. 197301082005011007

PEMBIMBING II

Dr. Hj. Nahriyah Fata, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197007031996032001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal	: Skripsi a.n. Risky Prisal Aditya	Padangsidempuan, 27 Januari 2025
Lampiran	: 7 (Tujuh) Exemplar	Kepada Yth, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan di- Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi a.n Risky Prisal Aditya yang berjudul **"Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH.Abdulrahman Wahid"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Sehat Sulthoni Dalimunthe, M.A.
NIP. 19730108 200501 1 007



Dr. Hj. Nahriyah Fata, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19700703 199603 2 001

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH.Abdulrahman Wahid”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Februari 2025
Pembuat Pernyataan



Risky Prisal Aditya
NIM. 2020100233

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Prisal Aditya
NIM : 2020100233
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah Saya yang berjudul **“Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH.Abdulrahman Wahid”** bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 26 Februari 2025



Risky Prisal Aditya
NIM. 2020100233

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Prisal Aditya
NIM : 2020100233
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : S1- Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 481 Sibolga

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa segala dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pendaftaran Sidang Munaqasyah adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen-dokumen yang tidak benar atau palsu, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai persyaratan mengikuti ujian Munaqasyah.

Padangsidempuan, 26 Februari 2025
Pembuat Pernyataan



Risky Prisal Aditya
NIM. 2020100233



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Risky Prisal Aditya
NIM : 2020100233
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : PENDIDIKAN DEMOKRASI ISLAMI MENURUT
KH. ABDULRAHMAN WAHID

Ketua

Dr. Abdusima Nasution, M.A
NIP.197409212005011002

Sekretaris

Misahradarsi Dongoran, M.Pd
NIP.199007262022032001

Anggota

Dr. Abdusima Nasution, M.A
NIP.197409212005011002

Misahradarsi Dongoran, M.Pd
NIP.199007262022032001

Dr. Hj. Nahriyah Fata, S.Ag.,M.Pd
NIP.197007031996032001

Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag.,M.Pd
NIP.197510202003121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Ujian Munaqasyah Prodi PAI
Tanggal : 06 Maret 2025
Pukul : 09:00 WIB s/d 12:00 WIB
Hasil/Nilai : 80/A
Indeks Prestasi Kumulatif : Cukup/Baik/Amat Baik/ Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH.Abdulrahman Wahid
Nama : Risky Prisal Aditya
NIM : 2020100233
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Padangsidempuan, 26 Februari 2025
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan



Dr. Lili Lida, M.Si
209202000032002

ABSTRAK

Nama : Risky Prisal Aditya

NIM : 2020100233

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul : Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH. Abdurrahman Wahid

Pendidikan demokrasi Islami menurut KH. Abdurrahman Wahid relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Konsep ini menekankan inklusivitas, moderasi, dan demokrasi dalam pendidikan agama untuk melahirkan generasi cerdas, berakhlak mulia, dan berkontribusi bagi bangsa. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan studi tokoh, menganalisis pemikiran KH. Abdurrahman Wahid secara holistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran pendidikan adalah fondasi utama demokrasi. Tanpa kejujuran, sistem demokrasi tidak akan sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kejujuran pendidikan harus dimulai sejak dini dan dikembangkan sepanjang hayat. Dalam demokrasi, beliau berpandangan bahwa kemenangan suara terbanyak bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Demokrasi harus mempertimbangkan prinsip keadilan, keterwakilan, serta perlindungan terhadap minoritas. KH. Abdurrahman Wahid membedakan beberapa bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung yang kurang efektif untuk Indonesia, demokrasi liberal yang berisiko menimbulkan ketimpangan, dan demokrasi perwakilan yang lebih sesuai karena mengakomodasi keberagaman serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi implementasi konsep ini dalam sistem pendidikan serta membandingkannya dengan pemikiran tokoh lain. Selain itu, kajian mendalam diperlukan untuk menganalisis efektivitas kejujuran pendidikan dalam membentuk budaya demokrasi. Studi komparatif dengan sistem pendidikan demokrasi di negara lain juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengembangkan model pendidikan demokrasi Islami yang kontekstual dengan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan, Demokrasi, Islami, KH. Abdurrahman Wahid

ABSTRACT

Name : Riski Prisal Aditya

Reg Number : 2020100233

Department : Islamic Education

Theses Title : ***Islamic Democratic Education According to KH. Abdurrahman Wahid***

Islamic democratic education, according to KH. Abdurrahman Wahid, is relevant to Indonesia's current condition. This concept emphasizes inclusivity, moderation, and democracy in religious education to nurture a generation that is intelligent, virtuous, and contributes to the nation. This research employs a literature study method with a character study approach, analyzing KH. Abdurrahman Wahid's thoughts holistically. The research findings show that honesty in education is the fundamental pillar of democracy. Without honesty, the democratic system cannot be healthy or sustainable. Therefore, honesty in education must be instilled from an early age and continuously developed throughout life. In democracy, he believed that winning the most votes is not the only measure of success. Democracy must also consider the principles of justice, representation, and the protection of minorities. KH. Abdurrahman Wahid distinguished several forms of democracy: direct democracy, which is less effective for Indonesia; liberal democracy, which risks creating inequality; and representative democracy, which is more suitable as it accommodates diversity and integrates religious and cultural values. Further research could explore the implementation of this concept in the education system and compare it with the thoughts of other scholars. Additionally, an in-depth study is needed to analyze the effectiveness of honesty in education in shaping a democratic culture. A comparative study with democratic education systems in other countries could also provide broader perspectives for developing a contextualized model of Islamic democratic education suitable for Indonesian society.

Keywords: ***Education, Democracy, Islamic, KH. Abdurrahman Wahid***

الخلاصة

الاسم : رسقي فريسلا ادتيا
رقم القيد : ٢٠٢٠١٠٠٢٣٣
القسم : دراسة التربية الإسلامية
العنوان : التربية الإسلامية الديمقراطية حسب كيبى عبدالرحمن وحيد

إن التربية الديمقراطية الإسلامية وفقاً للخليفة عبد الرحمن وحيد ذات صلة بالوضع الحالي لإندونيسيا. ويؤكد هذا المفهوم على الشمولية والوسطية والديمقراطية في التعليم الديني لتخريج جيل ذكي ونبييل ومساهم في الأمة. يستخدم هذا البحث أسلوب دراسة الأدب مع منهج دراسة الشخصية، وتحليل أفكار الشيخ عبد الرحمن وحيد تحليلاً شاملاً. وتظهر النتائج أن الأمانة التربوية هي الأساس الرئيسي للديمقراطية. فبدون الصدق لن يكون النظام الديمقراطي سليماً ومستداماً. لذلك، يجب أن يبدأ الصدق التربوي في وقت مبكر ويتم تطويره طوال الحياة. ويعتقد أن الفوز بأكبر عدد من الأصوات في الديمقراطية ليس المقياس الوحيد للنجاح. يجب أن تراعي الديمقراطية مبادئ العدالة والتمثيل وحماية الأقليات. ويميز عبد الرحمن وحيد بين عدة أشكال من الديمقراطية: الديمقراطية المباشرة، وهي أقل فعالية بالنسبة لإندونيسيا، والديمقراطية الليبرالية التي تخاطر بخلق عدم المساواة، والديمقراطية التمثيلية التي تعد أكثر ملاءمة لأنها تستوعب التنوع وكذلك القيم الدينية والثقافية المحلية. يمكن إجراء المزيد من البحوث لاستكشاف تطبيق هذا المفهوم في النظام التعليمي ومقارنته بأفكار الشخصيات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى دراسات متعمقة لتحليل فعالية الصدق التعليمي في تشكيل ثقافة الديمقراطية. كما يمكن أن توفر الدراسات المقارنة مع أنظمة التعليم الديمقراطي في بلدان أخرى منظوراً أوسع في تطوير نماذج تعليمية ديمقراطية إسلامية تتناسب مع المجتمع الإندونيسي.

الكلمات الرئيسية: التعليم، الديمقراطية، الإسلام، كيبى عبدالرحمن وحيد

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur *Alhamdulillah*, tiada sanjungan dan pujian yang berhak diucapkan selain hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan dan kelapangan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun ummat manusia menuju jalan kebenaran dan keselamatan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk mengakhiri perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Skripsi ini berjudul: “**Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH. Abdurrahman Wahid**”.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan masih minimnya ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Namun, berkat hidayah-Nya serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe, M.A. pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nahriyah Fata, S.Ag., M.Pd. pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A. sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dr. Lelya Hilda, M.Si. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Ibu Dr. Hj. Lis Yulianti Siregar, S.Psi., M.A. Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ali Asrun Lubis, S.Ag., M.Pd. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak H. Hamdan Hasibuan, M.Pd. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak Dr. Abdusima, M.A. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
7. Bapak Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe, M.A. Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran yang bermanfaat bagi peneliti.
8. Bapak dan Ibu Dosen, staf dan pegawai, serta seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dukungan moral kepada peneliti selama dalam perkuliahan.
9. Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, beserta staf pegawai perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada Ayahanda (Mirsal) dan ibunda tercinta (Apriani) yang telah bersusah-payah mengasuh dan mendidik peneliti sehingga menjadi

manusia yang berguna serta dapat melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi dan dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini, serta tidak bosan untuk selalu memberikan nasihat, arahan serta motivasi yang baik terhadap peneliti, bahkan telah banyak mengorbankan harta dan tenaga kepada peneliti serta doa yang selalu dilantarkan untuk kesuksesan dan keberkahan bagi setiap langkah peneliti selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

11. Rekan-rekan seperjuangan (Adrian Maulana, Syafrinaldi, Aisyah Rahmawani, dan Rahma Waddah) yang telah memberikan motivasi serta berkontribusi dalam memberikan informasi kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca, peneliti ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padangsidempuan, Maret 2025

Peneliti

Risky Prisal Aditya
NIM. 2020100233

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	H	ha(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)

ع	'ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	'	<i>apostrof</i> , tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ /	Fathah	A	A
_____ /	Kasrah	I	I
_____ و	Dammah	U	U

- a. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
... ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i

أ.....	Fathah dan wau	Au	a dan u
--------	----------------	----	---------

- b. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamarah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh hurufsyamsah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh hurufqamarah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsah maupun huruf qamarah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, a tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa

dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penyuylisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagan tek terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresman pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, 2003. Jakarta: Proyek Pengajian dan pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN/DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Pustaka.....	12
1. Kerangka Konseptual	12
a) Pendidikan.....	12
1) Pengertian Pendidikan.....	12
2) Tujuan Pendidikan	17
3) Metode Pendidikan.....	19
b) Demokrasi	21
c) Islami.....	28
2. Penelitian Terdahulu	32
H. Metodologi Penelitian	36
1. Pendekatan dan Metode Penelitian	36
2. Sumber Data.....	36
3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
4. Teknik Analisis Data.....	39
BAB II: DEMOKRASI SUARA TERBANYAK MENURUT	
KH. ABDURRAHMAN WAHID	40
BAB III: PENDIDIKAN KEJUJURAN DALAM	
DEMOKRASI MENURUT KH. ABDURRAHMAN WAHID.	54
BAB IV: DEMOKRASI LANGSUNG MENURUT	
KH. ABDURRAHMAN WAHID.....	64

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Implikasi Hasil Penelitian	71
C. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Tentang Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH.
Abdurrahman Wahid

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki berbagai macam keragaman, baik itu suku, budaya, adat istiadat, bahasa, maupun agama, sehingga negara ini dilambangkan sebagai Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda namun tetap satu juga, hal ini merupakan semboyan bagi negara Indonesia untuk mewadahi perbedaan suku, budaya, agama, adat istiadat, dan perbedaan lainnya yang terdapat dalam warga negara Indonesia itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat populer. Tidak ada istilah lain dalam wacana politik yang banyak dibicarakan orang, aktivis, politisi ataupun akademisi, melebihi istilah demokrasi. Istilah ini juga didambakan semua orang terutama yang mempunyai kesadaran politik, untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa demokrasi akan lebih banyak membawa kemaslahatan manusia ketimbang implikasi negatifnya, yakni mahal dan kompleksnya dalam proses pembuatan kebijakan publik.¹

Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan

¹ NR. Ifitah, "Islam dan Demokrasi," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2014), hlm. 1.

yang lama kepada setiap anak (peserta didik) mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Demokratisasi pendidikan secara umum merupakan keadaan di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam menikmati hak Pendidikan. Ketika definisi umum ini dipersempit maka akan muncul konsep bahwa implementasi demokratisasi pendidikan tersebut terlihat dari kegiatan pembelajaran dengan suasana saling menghormati, bebas mengutarakan pendapat dengan tetap menghargai serta adanya keterlaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang antara pendidik dan peserta didik.²

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang sangat dekat dengan konsep demokratisasi pendidikan terdapat dalam Q.S. Al-Imran [3]: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka

² Lalu Nasrulloh dan Zulkarnain, “Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Jurnal Al-Riwayah* Vol. 15, No. 2 (2023), hlm. 283.

*bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*³

Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad Saw diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lembut kepada umatnya. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya kelembutan dalam mendidik dan membimbing umat. Nabi Saw yang terkenal dengan akhlak mulianya diingatkan untuk tidak bersikap kasar atau keras, karena jika beliau melakukannya, umat akan enggan mengikuti dan mendengarkan petunjuk beliau. Sebaliknya, dengan kelembutan, umat akan lebih mudah menerima nasihat dan petunjuk.⁴

Tafsir Ibnu Katsir juga memberikan penjelasan serupa, namun dengan menambahkan bahwa ayat ini menunjukkan rahmat Allah yang besar kepada umat Nabi Muhammad Saw. Ibnu Katsir menyatakan bahwa sifat lembut ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan dakwah Nabi, karena kelembutan hati Nabi mampu mengubah hati umat untuk lebih mudah menerima kebenaran. Selain itu, Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, serta berusaha memperbaiki kesalahan dengan cara yang penuh kasih sayang dan pengertian.⁵

Seiring dengan hal tersebut, maka para pemikir dalam bidang pendidikan Islam berusaha untuk menyatukan perbedaan itu melalui konteks

³ Q.S. Al-Imran [3]: 159.

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Juz 3* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 112.

⁵ Ismail bin Umar Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim (Tafsir Ibnu Kathir) Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 152.

multikulturalisme yang sudah lama dikembangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid dan menjadi pola pikir tersendiri dalam diri KH. Abdurrahman Wahid dengan tetap menghargai keberagaman mereka. Ini merupakan tugas berat, di satu sisi kehidupan modern menuntut kemampuan intelektual untuk merespon secara positif dan kreatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tanpa harus melepaskan diri dari substansi dan prinsip-prinsip universal agama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia, disisi lain juga menuntut sikap keberagaman yang inklusif dan toleran dengan menggunakan paradigma kontekstualisasi pemikiran klasik, maka sikap-sikap tersebut bisa diekspresikan secara nyata oleh KH. Abdurrahman Wahid.⁶

KH. Abdurrahman Wahid dilahirkan di Denanyar, dekat kota Jombang, Jawa timur, di rumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya, KH. Bisri Syamsuri (1887-1980), pada tanggal 4 Agustus 1940. Terlahir dengan nama kecil Abdurrahman ad-Dakhil (sang penakhluk). Ayahnya sangat terkenal dan dihormati oleh berbagai kalangan adalah KH. Abdul Wahid Hasyim (1914-1953), yang pernah menjadi menteri agama pertama dalam kabinet RIS di bawah pemerintahan Soekarno dan termasuk pemimpin gerakan revolusioner melawan penjajah setelah akhir Perang Dunia II. KH. Abdul Wahid Hasyim sendiri adalah putra KH. Hasyim Asy'ari (1871- 1947), pendiri dan Ro'is 'Aam NU pertama (Ra'is Akbar) yang sangat disegani oleh masyarakat Islam Indonesia. Sementara ibunya Sholichah adalah putri sulung KH. Bisri Syamsuri, tokoh ulama dan Ra'is 'Aam ketiga. Jika dilihat dari garis

⁶ Tejo Waskito dan Nur Kholik, *Enigmatik: Revolusi Paradigma Ke-Islaman Nahdlatul Ulama* (Tasik Malaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 120.

geneologinya, KH. Abdurrahman Wahid jelas merupakan bagian dari trah keluarga yang memiliki darah biru ke-NU-an.⁷

KH. Abdurrahman Wahid merupakan seorang tokoh budaya, agama, serta politikus yang mampu menerapkan keragaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia, dan juga sekaligus seorang makhluk yang menikmati keragaman itu sendiri tanpa harus mencederai rasa persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dari sisi pendidikan, KH. Abdurrahman Wahid melalui pemikiran multikulturalismenya menginginkan konsep pendidikan Islam bisa diterapkan dengan mengedepankan nilai-nilai multikultural sehingga rasa saling menghargai, menghormati antar sesama baik dalam lingkungan pendidikan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bisa tumbuh dan berjalan dengan baik, karena mengingatkan bangsa Indonesia ini sangat majemuk. Namun, dengan melihat sering terjadi perubahan kurikulum dan sistem dalam lembaga pendidikan, sehingga untuk menerapkan itu semua tidaklah mudah, dan juga banyak faktor-faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Berbagai dampak dan kendala yang akan muncul dikemudian hari dikarenakan adanya perbedaan pandangan maupun ketidakpuasan terhadap aspek-aspek kehidupan umat manusia seperti aspek budaya, politik, ekonomi yang seringkali mengalami ketimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat.

⁷ Tejo Waskito dan Nur Kholik, *Enigmatik: Revolusi Paradigma Ke-Islaman*, ... hlm. 120.

KH. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya multikulturalisme, baik ditengah-tengah masyarakat, dikalangan politik, budaya, lebih-lebih dalam konteks pendidikan agama Islam. Banyak tokoh yang telah mencatat hasil pemikiran KH. Abdurrahman Wahid terkait dengan hal tersebut, karena beliau sangat terbuka terhadap konsep multikulturalisme yang berusaha mengakomodir segala perbedaan dengan selalu hidup berdampingan secara damai. Hal tersebut beliau lakukan tidak hanya menggunakan hasil pemikiran Islam tradisional saja. Namun, lebih pada penggunaan metodologi teori hukum (*ushul al-fiqh*) dan kaidah-kaidah hukum (*qawaid fiqhiyah*), serta pemikiran kesarjanaan Barat dalam kerangka pembuatan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.⁸

Demokrasi yang dicita-citakan oleh KH. Abdurrahman Wahid adalah berjalannya suatu kenyataan kemajemukan masyarakat, yaitu adanya berbagai golongan dan kelompok, besar dan kecil, yang berbeda-beda bahkan bertentangan, yang berdasarkan suku, agama, keyakinan, kelompok kepentingan serta pengelompokan dengan dasar lainnya yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik. Dalam hal ini KH. Abdurrahman Wahid menginginkan suatu kehidupan masyarakat yang majemuk yang menjunjung kebebasan dan hak aspirasi warganya. Pada satu sisi eksternal, KH. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh yang bergerak melalui kultural, ia menjaga jarak

⁸ Miskan Abdul Gafur, *Gus Dur Multikulturalisme & Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 1-5.

dari kekuasaan untuk mengontrol pembangunan pemerintah. KH. Abdurrahman Wahid banyak menuangkan ide pemikirannya yang luas dalam memandang realitas sosial yang terjadi dengan wawasan keislaman yang mendalam demi kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa menghilangkan esensi ajaran agama itu sendiri. Dalam memandang konsep negara misalnya, KH. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa Islam tidak mengenal sebuah sistem negara secara formal.⁹

Mengingat pendidikan adalah salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga untuk mengembangkan potensi fitrah kemanusiaannya yang ada pada intinya, maka pendidikan wajib mendapatkan porsi yang sama untuk dikembangkan, sejajar dengan potensi dan fitrah yang lain. Konsep pendidikan yang ingin dikembangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid ialah *religious multiculturalism based education*, yaitu konsep pendidikan yang didasarkan pada keyakinan keagamaan dan bertujuan untuk membimbing atau menghantarkan peserta didik menjadi manusia yang utuh, mandiri, dan bebas dari belenggu penindasan. Dalam konsep ini, dia tampaknya tidak menolak akan potensi keberbedaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam sebuah konsep yang jelas dengan meletakkan heterogenitas tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan itu sendiri.¹⁰

⁹ M.Siswanto dan M. Anas Fakhruddin, "Islam Kosmopolitan Gus Dur dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Jurnal of Islamic Thought and Philosophy* Vol. 1, No. 1 (Juni 2022), hlm. 15.

¹⁰ Asep Ahmad Sukandar dan Muhammad Hori, *Pemikiran Pendidikan Islam: Sumbangan Para Tokoh Pendidikan Islam Melalui Gagasan Teori, dan Aplikasi* (Bandung: CV. Cendekia Press, 2020), hlm. 221-222.

Pendidikan multikultural telah menjadi kebutuhan yang mendesak tidak saja bagi bangsa Indonesia yang memiliki khazanah pluralitas yang tinggi, tetapi juga masyarakat dunia yang mempunyai potensi dan karakter keberbedaan yang besar. Pendidikan Islam tentu harus sanggup meluruskan respon terhadap tantangan modernasi serta pemahaman Islam dan pendidikan Islam formalis menuju pendidikan Islam yang berbasis pada pribumisasi pendidikan Islam.¹¹

Pendidikan demokrasi Islami menurut KH. Abdurrahman Wahid merupakan sebuah konsep yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Konsep ini menawarkan sebuah alternatif yang lebih inklusif, moderat, dan demokratis dalam pendidikan agama. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai pemikiran tokoh pendidikan Islam. Tokoh yang akan peneliti teliti adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dengan judul **“Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH. Abdurrahman Wahid”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini kebeberapa hal yaitu Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH. Abdurrahman Wahid.

¹¹ Asep Ahmad Sukandar dan Muhammad Hori, *Pemikiran Pendidikan Islam*,... hlm. 223.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, peneliti akan membatasi istilah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.¹² Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan demokrasi.

2. Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang masalah mereka sendiri dengan memilih wakil rakyat ke parlemen atau badan jenis.¹³ Demokrasi merupakan kata yang sangat populer dikalangan masyarakat, hampir seluruh lapisan masyarakat mengenal dan memahami dengan baik makna demokrasi. Demokrasi sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat, karena dengan demokrasi hak-hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan negara mendapat jaminan dan

¹² Husamah, dkk, *Pengantar Pendidikan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), hlm. 31.

¹³ Maryam Salampessy, dkk, *Dinamika Demokrasi Abad 21* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm. 2.

perlindungan dari negara. Demokrasi adalah salah satu terminologi yang digunakan oleh beberapa negara termasuk negara yang berpenduduk muslim salah satunya adalah Indonesia.¹⁴ Demokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah demokrasi Islami menurut KH. Abdurrahman Wahid.

3. Islam

Islam merupakan nama agama. Islam adalah agama Allah SWT. yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya guna diajarkan kepada manusia. Islam juga merupakan tuntutan kebutuhan seluruh umat manusia yang digunakan sebagai pedoman hidup, baik bagi kehidupan duniawi maupun kehidupan sesudah mati.¹⁵

Islam Juga merupakan agama yang secara relatif datang paling belakang di Indonesia dan hal ini membentuk eksperesinya di negeri ini. Indonesia tak banyak memberi informasi mengenai proses perpindahan agama, terutama di pedalaman Jawa, sebenarnya terjadi belum terlalu lama. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa Indonesia masih berada dalam proses pengislaman.¹⁶ Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pendidikan demokrasi Islami Menurut KH. Abdurrahman Wahid.

¹⁴ Muhammad Taufik, dkk, "Islam dan Demokrasi", *Jurnal Studi Pengetahuan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 2.

¹⁵ Muhammad Zeni Rochmatullah Ilyas dan Afdhol Abdul Hanaf, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 2.

¹⁶ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: PT. LKiS, 2002), hlm. 65.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan di atas, permasalahan pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana demokrasi suara terbanyak menurut KH. Abdurrahman Wahid?
2. Bagaimana demokrasi jujur dan tidak jujur menurut KH. Abdurrahman Wahid?
3. Bagaimana demokrasi langsung menurut K.H. Abdurrahman Wahid?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui demokrasi suara terbanyak menurut KH. Abdurrahman Wahid.
2. Untuk mengetahui demokrasi jujur dan tidak jujur menurut KH. Abdurrahman Wahid.
3. Untuk mengetahui demokrasi langsung menurut K.H. Abdurrahman Wahid.

F. Manfaat Penelitian

Dengan terjadinya tujuan tersebut, kegunaan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi peneliti, bisa menjadi tambahan pengetahuan atau wawasan tentang ide Abdurrahman Wahid dalam pendidikan Islam.

2. Bagi civitas akademika, guna memperluas khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan.
3. Bagi masyarakat, dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan literatur tentang tokoh pendidikan Islam.

G. Kajian Pustaka

1. Kerangka Konseptual

a. Pendidikan

1) Pengertian Pendidikan

Secara etimologi istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada term *al-tarbiyah*, *al-ta'dib* dan *al-ta'lim*. Dari ketiga istilah tersebut yang paling populer digunakan dalam praktik pendidikan Islam adalah *al-tarbiyah*, sedangkan *al-ta'dib* dan *al-ta'lim* jarang sekali. Sebab, untuk kata pendidikan yang diambil dari *education* itu bukan hanya untuk manusia saja, sedangkan kata *ta'dib* tidak meliputi makhluk-makhluk lain selain manusia (dan tidak sekedar mengajar). Jadi, kata *ta'dib* sudah meliputi kata *ta'lim* dan *tarbiyah*. Selain itu, *ta'dib* lebih erat hubungannya dengan kondisi ilmu dalam Islam yang termasuk dalam isi pendidikan.

Adapun pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term: *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib*, *riyadah*, *irsyad*, dan *tadris*. Masing-masing memiliki keunikan makna tersendiri, namun memiliki makna yang sama. Akan tetapi, term yang populer digunakan dalam praktek Pendidikan Islam adalah term *al-tarbiyah*.

Oleh karena itu, dalam khazanah ke-Islaman populer, istilah *tarbiyah* mencakup keseluruhan aktivitas pendidikan, di dalamnya tercakup upaya mempersiapkan individu secara sempurna.

Istilah kunci yang seakar dengan kata *tarbiyah* adalah *al-rabb*, *rabbay*, *murabbi*, *yurbi*, dan *rabbi*. Istilah *tarbiyah* yang diambil dari madi-nya (*rabba*) memiliki arti memproduksi, mengasuh, menanggung, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, dan menjinakkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Isra' [17]: 24:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” (Q.S. al-Isra' [17]: 24).¹⁷

Menurut tafsir kependidikan, para mufassir telah ikut memberikan kontribusi mengenai konsep *tarbiyah* (تربية) dalam al-Qur'an, seperti al-Qurthubi, ar-Razi, al-Qasimi, dan lain. Menurut al-Qurthubi, kata *arrabb* sebagai kata yang diduga merupakan sumber makna kata *tarbiyah*, yang mempunyai makna yang sangat luas, yaitu memiliki/pemilik, berusia tua, maha memperbaiki (*shalih*, *mushlih*), yang maha mengatur (*nadhim*), yang maha mengubah (*mughayyir*), dan yang maha menunaikan (*'amil*, *muqtadli*), memelihara, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan, dan mendidik (*tarbiyah*).

¹⁷ Q.S. al-Isra' [17]: 24.

Sedangkan kata tarbiyah, menurut Syekh ar-Razi, merupakan kata yang diturunkan dari kata *rabbayani* (Q.S. al-Isra': 24) yang berarti *tanmiyah*, yakni memperbaiki (*ishlah*) dan menumbuh-kembangkan melalui proses pendidikan.¹⁸

Secara terminologi proses pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan kemampuan-kemampuan dasar dan potensi belajar, agar peserta didik bisa tumbuh secara baik dan mengembangkan potensi dirinya secara positif di dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu ataupun anggota sosial dan alam sekitar. Tuntutan ini tentunya mengharuskan penanaman nilai-nilai pendidikan dan akhlaq *al-karimah*, sehingga dengan proses tersebut dapat mewujudkan manusia yang berilmu dan berprestasi luhur.

Bimbingan dan pembinaan tersebut tidak hanya berorientasi pada daya pikir (intelektual) saja, akan tetapi juga pada segi emosional yang dengan pembinaan dan bimbingan akan dapat membawa perubahan pada arah yang lebih positif. Dari paradigma sebelumnya dapat dipahami bahwa, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terkonsep serta terencana untuk memberikan pembinaan dan pembimbingan pada peserta didik (anak-anak). Sehingga Pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Ia dapat dengan mudah

¹⁸ Syakur Mahlail, *Tafsir Kependidikan: Menelusuri Jejak Kisah al-Khadlir dalam al-Qur'an* (Jawa Tengah: MASEIFA Jendela Ilmu, 2012), hlm. 107-108.

membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.

Dari ungkapan Pendidikan Islam yang dikemukakan di atas, penekanan utama diberikan kepada pentingnya pembentukan akhlak, disamping adanya penekanan persoalan fitrah dan ikhtiyar manusia untuk memperoleh penghidupan yang makmur dan bahagia sesuai dengan keilmuan dan prinsip Islam.¹⁹

Menurut Dzakiah Daradjat pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal. Dan karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan hidup bersama, maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.

- a) Menurut Hasan Langgulung pendidikan Islam diartikan sebagai *al-tarbiyah al-diniyah* (pendidikan keagamaan), *al-tarbiyah fi al-Islam* (pendidikan dalam Islam), *al-tarbiyah 'inda al-muslimin* (pendidikan di kalangan orang-orang Islam).
- b) Muhammad Quthb dalam salah satu bukunya mengenai pendidikan Islam, *Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah*, menyatakan bahwa pendidikan merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, ruhani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya, serta segala aktivitasnya, baik aktivitas individu maupun sosial dan lingkungannya berdasarkan nilai-nilai moral

¹⁹ Efendi, *Pendidikan Islam Transformatif: Ala.KH. Abdurrahman Wahid* (GUEPEDIA, 2016), hlm. 33-35.

Islam. Pendidikan dalam perspektif Islam merupakan proses pembentukan individu berdasarkan nilai-nilai Islam.

- c) Al-Ghazali dalam pandangan Busyairi Majdi mengemukakan bahwa pendidikan dalam pandangan Islam merupakan suatu kegiatan yang sistematis yang melahirkan perubahan progresif pada tingkah laku manusia atau usaha untuk menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Pendapat al-Ghazali ini lebih menitik beratkan proses pendidikan pembentukan akhlak mulia. Pendapatnya ini salah satunya didasarkan pada suatu konsepsi bahwa Rasulullah Saw, diutus ke dunia untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia.
- d) Al-Qardhawi sebagaimana dikemukakan oleh Saifullah menyatakan bahwa pendidikan dalam perspektif Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, ruhani dan jasmaninya serta akhlak dan keterampilannya. Pendapatnya ini hampir sama dengan Muhammad Quthb. Namun al-Qardhawi menambahkan, pendidikan menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan perang dan damai dan menyiapkan manusia untuk menghadapi masyarakat dengan segala karakteristiknya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan upaya mengembangkan seluruh potensi individual dan sosial manusia berdasarkan ajaran Islam.²⁰

2) Tujuan Pendidikan

Tujuan Pendidikan Islam perspektif Gus Dur merupakan seluruh institusi yang terorganisasi tentu harus mempunyai manajemen yang bagus dan harus mempunyai tujuan yang bermutu. Hal ini untuk menghasilkan regenerasi yang siap untuk bersaing secara kompetitif, begitu pula dengan adanya pendidikan Islam perlu adanya pembenahan di segala lini serta modernisasi sistem secara kelembagaan, supaya mampu mencetak manusia-manusia untuk menjadi pemimpin di masa mendatang, bukan kemudian menjadi robot-robot pencetak uang yang mampu dikendalikan oleh penguasa yang zalim.

Tujuan pendidikan Islam untuk memanusiakan manusia merupakan hal yang mutlak adanya. Hal itu karena pendidikan Islam adalah wahana untuk pemerdekaan dan pembebasan manusia untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya sehingga akan tampak karakteristik dari pola-pola yang dikembangkan oleh pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam secara filosofis bertujuan sesuai dengan hakikat penciptaan manusia, yaitu untuk menjadi hamba dan mengabdikan kepada Allah SWT. Manusia sebagai makhluk yang berakal sebagai makhluk yang

²⁰ Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 17.

sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Q.S al-Dzariyat [51]: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Q.S al-Dzariyat [51]: 56).²¹

Pada hakikatnya, tujuan Pendidikan Islam identik dengan tujuan Islam walaupun hal tersebut masih mengandung kontroversial di kalangan para ahli pendidikan. Seperti apa yang dinyatakan oleh H.A.R. Gib dalam bukunya Jalaluddin yang berjudul “Teologi Pendidikan”, pendidikan itu tidak hanya berpandangan pengajaran agama saja. Menurutnya, Islam bukan hanya sistem teologi saja yang harus mengembangkan aspek *ubudiyah*, melainkan juga memuat satu sistem peradaban yang lengkap yang mengandung aturan di segala kehidupan termasuk aspek muamalahnya.²²

Tujuan Pendidikan Islam sebagaimana yang ditransformasi dari Al-Qur’an dan Hadits sebagai berikut:

- a) Pendidikan Islam bertujuan membangun kepribadian seorang muslim sebagai hamba Allah yang saleh dalam membangun misi kenabian dan keumatan yaitu, beribadah hanya kepada Allah semata.
- b) Pendidikan Islam mengantarkan manusia menjadi manusia yang sempurna agar mampu menjalankan tugas sebagai *khalifah fil ardi*, karena pada hakekatnya manusia diciptakan juga berkedudukan

²¹ Q.S. al-Zariyat [51]: 56.

²² Miskan Abdul Gafur, *Gus Dur Multikulturalisme & Pendidikan Islam ...*, hlm.121.

sebagai khalifah yang amanahnya berada dipundak untuk mengurus urusan di dunia dengan baik.

- c) Pendidikan Islam bertujuan membangun masyarakat yang terbaik (*khairu ummah*) dengan membawa misi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia pada jalan kebaikan dan mencegah manusia pada jalan keburukan.
- d) Pendidikan Islam bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang berlaku adil, bermoral, berkarakter dan pemberani dalam membela kebenaran, dengan misi yang disampaikan tersebut dapat menjadi saksi terhadap perilaku peradaban bangsa-bangsa di dunia, karena dakwah yang disampaikan adalah dakwah rahmat bagi seluruh alam.²³

3) Metode Pendidikan

Dalam pemikiran KH. Abdurahman Wahid, metode pendidikan Islam haruslah beragam, mengingat penduduk bangsa Indonesia yang majemuk secara geografis. Pendidikan Islam dalam perspektif KH. Abdurahman Wahid haruslah mempunyai metode yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia, khususnya pada pendidikan Islam.

Dalam setiap dialog, ceramah ilmiah maupun pengajian umum, KH. Abdurahman Wahid selalu menggunakan metode penyampaian materi yang enak didengarkan oleh pendengarnya, meskipun berjam-jam tetap asik mendengarkannya. Hal ini dikarenakan metode penyampaian

²³ Miskan Abdul Gafur, *Gus Dur Multikulturalisme & Pendidikan Islam ...*, hlm.122-123.

materi yang disampaikan KH. Abdurahman Wahid sangat beragam. Diantara metode penyampaian materi yang biasa dilakukan KH. Abdurahman Wahid antara lain:

a) Metode *Qishah*

KH. Abdurahman Wahid sering menyampaikan materi dakwah ataupun pendidikan dengan menggunakan kisah keteladanan ataupun kisah-kisah lucu yang mudah dipahami oleh pendengarnya. Menurut Abuddin Nata, melalui metode kisah guru mampu memberikan daya tarik yang menyentuh perasaan anak sebagai salah satu teknik pendidikan.

b) Metode *Ta'lim al-Kitab*

KH. Abdurahman Wahid mengambil sikap dan langkah yang berbeda dengan mayoritas aktivis Islam karena ia memiliki dasar yang kuat. Metode *Ta'lim al-Kitab* ini sangat ditekankan khususnya di kalangan pondok pesantren. Dalam kitab *itmam al-dirayah*. Imam Al-Suyuti menyusun silabi sebagai dasar acuan pondok pesantren tradisional selama ini. Silabi pendidikan pesantren dikembangkan kedalam 14 macam disiplin ilmu, dimulai dari ilmu nahwu atau tata bahasa arab klasik hingga tafsir al-Qur'an dan teks hadis nabi, semuanya dipelajari dalam lingkungan pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam.

c) Metode *Ibrah* atau *Mauidzah*

Metode *ibrah* atau *mauidzah* merupakan suatu cara penyampaian materi pelajaran melalui penyampaian perkataan yang berisi nasihat-nasihat dan peringatan yang berasal dari pengalaman hidup. Teknik mengajar menggunakan metode *ibrah* *mauidzah* sudah dilaksanakan sejak dulu, khususnya dalam menyampaikan materi pelajaran agama Islam. Oleh karena itu dalam menyampaikan isi materi Al-Qur'an, guru juga dituntut untuk menggunakan bahasa yang lemah lembut, jelas, tegas dan menyentuh jiwa.²⁴

b. Demokrasi

Menurut kamus Munjid, demokrasi berasal dari kata Yunani “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan. Secara umum, demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan melalui mekanisme suara mayoritas.

Demokrasi Islam adalah konsep pemerintahan yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam, di mana kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Allah, namun keputusan-keputusan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dilakukan berdasarkan musyawarah dan konsultasi (*syura*) antara umat Muslim. Demokrasi Islam menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan ketaatan terhadap hukum-hukum Allah dalam menjalankan pemerintahan.

²⁴ Siti Kusriani, *Jejak Pemikiran Pendidikan Ulama Nusantara: Genealogi, Historiografi, dan Kontekstualisasi Pendidikan Islam di Nusantara* (Semarang: CV. Asna Pustaka, 2021), hlm. 25-26.

Dalam Islam, demokrasi dapat dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi umat Muslim secara aktif, namun tetap mengacu pada syariat Islam. Demokrasi dalam Islam bukan berarti kedaulatan rakyat tanpa batas, melainkan kedaulatan Allah yang diterapkan melalui kesepakatan dan musyawarah umat untuk mencapai kebaikan bersama, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.²⁵

Salah satu ayat yang mendasari prinsip musyawarah dalam Islam adalah QS. Asy-Syura [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”²⁶

Ayat ini menunjukkan pentingnya musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan dalam kehidupan umat Islam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada keadilan dan kebajikan.

Demokrasi juga merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan kontrol sosial. Sistem pemerintahan demokrasi telah

²⁵ Muhammad Ali, *Demokrasi dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Islam, 2021), hlm. 75-78.

²⁶ QS. Asy-Syura [42]: 38.

diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. memiliki tiga unsur utama, yaitu adanya kemauan politik sebuah negara (*state*), adanya kemauan yang kuat dari politik masyarakat (*political society*), dan adanya *civil society* yang kuat dan mandiri. Ketiga unsur ini diproses dalam sebuah negara dengan tujuan untuk menjamin adanya kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan pemilihan umum yang dilangsungkan dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia.²⁷

Setelah itu untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang demokratis dalam berbagai aspek kehidupan perlu diupayakan suatu proses demokratisasi. Demokratisasi adalah suatu proses berkelanjutan untuk menuju demokrasi. Dalam konteks pendidikan merupakan sarana dan kesempatan paling strategis untuk mewujudkan iklim demokratisasi. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep, dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung. Dalam kaitan ini, upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis menjadi keharusan yang perlu disikapi secara positif oleh seluruh praktisi pendidikan. Sistem demokratisasi pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai koridor apabila semua warga negara memahami, menyadari, dan mendukung proses itu.

²⁷ Ali Miftakhu Rosyad, "Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 80.

Pendidikan demokrasi memiliki keterkaitan dengan pendidikan multikultural. Adapun konsep dari pendidikan multikultural yang ditawarkan Zamroni adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.
- 2) Pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran.
- 3) Pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan harus menuju pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar.
- 4) Pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan.²⁸

Pengertian demokratisasi menurut para pakar diterangkan bahwa itu merupakan proses membuat seluruh warga negara melalui wakil-wakilnya ataupun memutuskan siapa wakil mereka dalam pemilihan dan juga ikut serta dalam berbagai aktivitas bernegara dan bermasyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut

²⁸ Ali Miftakhu Rosyad, *Paradigma Pendidikan Demokrasi*,... hlm. 81-83.

Robert A. Dahl, dia menjelaskan secara singkat bahwa demokratisasi atau proses membuatnya menganut paham demokrasi.

Ahmad Syafii Ma'arif memiliki pandangan lain tentang demokratisasi, menurutnya bahwa demokratisasi memang melelahkan, tetapi gagasan kembali kepada sistem dinastik, otoritarian dalam berbagai format, hanya akan mempertinggi tempat jatuh. Oleh sebab itu, pilihan pada demokrasi adalah pilihan yang tepat sekalipun harus belajar dari berbagai kegagalan yang telah dilalui selama ini. Dari pandangan Ma'arif di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah jawaban dari pemerintahan yang cenderung pada dinasti dan otoritarian.

Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa Islam adalah agama demokrasi, Gusdur mengambil kesimpulan demikian karena berbagai alasan yakni; Pertama, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. Kedua, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) merupakan cara yang efektif. Ketiga Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalih umat*).²⁹

Keempat, demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Akan tetapi, Abdurrahman Wahid menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif justru mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satu-satunya

²⁹ Ahmad Suryadi, *Pemikiran Pendidikan Islam*, ... hlm. 18.

alternatif justru akan kehilangan relevansinya, menurutnya demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat.

Nurcholish Madjid mempunyai pandangan mengenai demokrasi. Menurutnya demokrasi menuntut adanya pandangan pribadi, lebih-lebih pada setiap pribadi para pemimpin, suatu pandangan yang selaras dengan keharusan berendah hati sehingga mampu melihat diri sendiri berkemungkinan salah, dan orang lain yang berbeda dengan dirinya berkemungkinan benar. Demokrasi tidak mungkin disertai dengan absolutisme dan sikap-sikap mau benar sendiri lainnya.

Demokrasi mengajarkan adanya sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai antara sesama warga masyarakat. Di bawah pertimbangan tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum, demokrasi tidak membenarkan adanya sikap *all or nothing* (semua atau tidak) *take it or leave it* (ambil, atau tinggalkan) yaitu sikap-sikap serba kemutlak- mutlakan. Dengan demikian demokrasi dalam pandangan Nurcholish Madjid adalah sebuah konsep yang mengutamakan kepentingan bersama dan menolak segala absolutisme.³⁰

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa demokrasi adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dan tidak hanya paksaan dalam melakukan segala sesuatu yang juga disertai sikap

³⁰ Ahmad Suryadi, *Pemikiran Pendidikan Islam, ...* hlm. 19.

tanggungjawab. Pandangan Nurcholish Madjid dalam diskursus demokrasi ke-Indonesiaan sangat terasa pengaruhnya, khususnya sejak awal tahun 1970-an tentang gagasan sekularisasi dan "Islam, Yes; Partai Islam No" dengan adanya pengistilahan tersebut banyak tokoh yang tidak sepakat karena hal tersebut dianggap sebagai pengukuhan Orde Baru sebagai status Quo.

Nurcholish Madjid menambahkan demokrasi memerlukan adanya kesediaan setiap pesertanya untuk menerima kenyataan bahwa keinginan seseorang tidak mungkin seluruhnya diterima oleh semua orang dan dilaksanakan, melainkan sebagian saja. Dari pandangan Nurcholish Madjid tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah kebebasan yang dimiliki individu untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan rasa tanggung jawab.³¹

Demokrasi dalam pendidikan Islam memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, dimana pengelolaan pendidikan akan banyak ditentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelola, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi atau materi, sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Disisi lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat.

³¹ Ahmad Suryadi, *Pemikiran Pendidikan Islam*, ... hlm. 20-21.

Dalam menciptakan pendidikan Islam yang lebih demokratis dan dalam rangka menghadapi perubahan masyarakat global, ada beberapa persoalan mendasar internal pendidikan Islam yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu: harus mengikis habis wawasan sejarah pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan gagasan yang di bawa Al-Qur'an, berupa persoalan dikotomik pendidikan Islam yang merupakan persoalan mendasar dari perkembangan pendidikan Islam selama ini. Pendidikan Islam harus dijauhkan dari dikotomik, menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama.³²

c. Islami

Islam merupakan agama yang selalu mengingatkan para pemeluknya untuk senantiasa mengevaluasi diri. Salah satu anjuran yang sangat populer berkaitan dengan hal ini adalah perkataan Umar ibn Khattab *Hasibu anfusakum qabl antuhasabu*. Secara literal, ungkapan ini dapat dimaknai sebagai anjuran kepada setiap Muslim untuk menghitung atau mengevaluasi diri sendiri sebelum data masa di mana mereka akan dievaluasi oleh Allah SWT.³³

Ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi:

³² Siti Romlah, "Demokrasi Pendidikan Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 12, No. 2 (2018), hlm. 3-4.

³³ Al Rasidin, *Falsafah Pendidikan Islami* (Citapustaka Media Perintis, 2008), hlm. 181.

- 1) Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kalau tidak demikian, maka hukum dalam Islam tidak jalan dalam kehidupan.
- 2) Islam memiliki asas permusyawaratan “amruhum syuraa bainahum”, artinya perkara-perkara mereka dibicarakan diantara mereka. Dengan demikian tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka pada akhirnya diakibatkan dengan kesepakatan.
- 3) Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Karena dunia ini hakikatnya adalah persiapan untuk kehidupan di akhirat. “*Waakhiratu Khairuu Waabqaa*” akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Karena itu kehidupan manusia tarafnya tidak boleh tetap, harus terus ada peningkatan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik di akhirat.³⁴

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang demokratis seperti *al-musawah* atau persamaan, *al-hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan, *al-ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia, *al-'adalah*, keadilan, *al-syura*, musyawarah, dan *al-mas'uliyah*, tanggung jawab, maka dalam pendidikan Islam dapat dilihat dari dua hal:

³⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 87-88.

1) Epistemologi pendidikan Islam demokratis

Islam sebagai rahmatan lil alamin telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang demokratis yang dapat dipahami bahwa dalam Islam, prinsip musyawarah dan persatuan umat merupakan salah satu sendi demokrasi yang perlu dikembangkan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dasar pelaksanaan pendidikan Islam juga dalam Q.S. al-Syura [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”³⁵

2) Paradigma pendidikan Islam demokratis

Dalam konsep Islam, manusia diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna di antara semua makhluk. Manusia memiliki fitrah, yang dalam hal ini terdapat beberapa pengertian mengenai arti fitrah tersebut. Fitrah secara etimologis berarti bersih dan suci. Kata fitrah terdapat dalam surat ar-Rum ayat 30 bahwa fitrah itu adalah keyakinan tentang keesaan Allah, sementara pengertian yang lain adalah potensi dalam diri manusia.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fitrah adalah sifat dan kemampuan dasar manusia yang memiliki

³⁵ Q.S. al-Syura [42]: 38.

kecenderungan kepada kesucian dan kebaikan (naluri beragama tauhid) dan merupakan kemampuan dasar yang secara otomatis dapat berkembang dan perlu diarahkan. Untuk mengembangkan dan atau mengarahkan fitrah diperlukan suatu proses. Proses itu tidak lain adalah proses pendidikan dalam maknanya yang luas.

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk membina, mengembangkan, memberdayakan dan mengarahkan potensi dasar insan agar sesuai dengan yang dikehendaki. Begitu juga halnya dengan pendidikan Islam. Berkaitan dengan pengembangan potensi manusia, tentunya dengan pendidikan Islam yang berparadigma demokratis setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrahnya.
- 2) Pendidikan yang menempatkan pendidik dan peserta didik sebagai subyek pendidikan yang saling berintegrasi, saling mengisi dan saling melengkapi satu dengan lainnya.
- 3) Pendidikan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap keilmuan dan konsisten dengan prinsip belajar tuntas.
- 4) Pendidikan yang tidak hanya berhenti pada retorika dan teori, tetapi ada langkah-langkah konkret estafet dan pengalaman ilmu.

Selain itu pendidikan Islam yang demokratis juga mengedepankan sisi humanisme dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perilaku manusia itu dipertimbangkan oleh *multiple intelligencenya*. Bukan hanya kecerdasan intelektual semata, tetapi kecerdasan emosional dan spiritual.
- 2) Anak didik adalah makhluk yang berkarakter, berkepribadian, aktif serta dinamis dalam perkembangannya sehingga pendidikan diarahkan untuk membentuk kepribadian dan *self concept*.
- 3) Dalam metode yang humanistik lebih menekankan aktualisasi diri.
- 4) Pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa (*students centered learning*).³⁶

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan adalah memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Previous Research*) tentang persoalan yang dikaji. Berikut ini peneliti sajikan kutipan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait diantaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Deby Sari, berjudul “Pendidikan Islam Perspektif KH. Abdurrahman Wahid”. (UIN Raden Intan Lampung, 2023). Penulisan skripsi ini sampai pada kesimpulan, bahwa pandangan KH. Abdurrahman Wahid tentang tujuan pendidikan Islam ialah suatu proses yang menjadikan manusia sebagai makhluk dan

³⁶ NR. Iftitah, *Islam dan Demokrasi*,... 44-46.

menjadikan manusia memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama makhluk dan alam. Ada tiga tujuan pendidikan Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid yaitu pendidikan Islam berbasis moderisme, pendidikan Islam berbasis pembebasan serta serta berbasis kebhinekaan. Terkait dengan kurikulum, KH. Abdurrahman Wahid melihat bahwa pesantren dinilai ideal sebagai kurikulum pendidikan Islam sebab pesantren memiliki nilai-nilai mandiri yang sudah sejak lama di Indonesia serta pesantren dapat dikatakan sub kultur sebab memiliki ciri khas yang menjadikan sebagai salah satu jati diri pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid ada tiga, yaitu metode Qishah, metode Ta‘lim alKitab metode Ibrah atau Mauizah. Yang terakhir strategi pendidikan Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid menggunakan tiga strategi, yaitu strategi sosial politik, strategi kebudayaan dan strategi sosial kebudayaan.³⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada pendidikan demokrasi Islami menurut KH. Abdurrahman Wahid.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Rusba Awalia, berjudul “Konsep Pendidikan Islam dalam Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid”. (IAIN Parepare, 2021). Penulisan skripsi ini sampai pada kesimpulan, bahwa konsep pendidikan Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid lahir dari

³⁷ Deby Sari, “Pendidikan Islami Perspektif KH. Abdurrahman Wahid”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

pemikiran Pluralisme dan Humanismenya, kedua pemikiran tersebut relevan dengan tujuan pendidikan Islam. Terdapat tiga tujuan pendidikan Islam dalam perspektif KH. Abdurahman Wahid yaitu pendidikan Islam berbasis modernisme, pendidikan Islam berbasis pembebasan dan pendidikan Islam berbasis kebhinekaan. Selain itu metode pendidikan Islam menurut KH. Abdurahman Wahid menggunakan empat strategi, yaitu strategi sosio-politik, kultural, sosio-kultural, dan pedagogis.³⁸ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada pendidikan demokrasi Islami menurut KH. Abdurrahman Wahid.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Tania, berjudul “Perspektif Abdurrahman Wahid Terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia”. (UIN Raden Intan Lampung, 2019). Penulisan skripsi ini sampai pada kesimpulan, bahwa penelitian ini menghasilkan tinjauan dari Pro-Kontra antara kelompok atas pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan menitikberatkan pada demokrasi Pancasila yang diyakini mampu untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang multikultural. Demikian Abdurrahman Wahid dengan pemikirannya, menyakini bahwa demokrasi saling beriringan dengan agama dan menekankan pada demokrasi Pancasila yang memiliki nilai dari masyarakat yang asli Indonesia. Demokrasi juga relevan dengan politik

³⁸ Rusba Awalia, “Konsep Pendidikan Islam dalam Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid”, *Skripsi*, IAIN Parepare, 2021.

karena demokratisasi tidak akan berjalan jika tidak ditunjang dengan terbangunnya budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi.³⁹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada pendidikan demokrasi Islami menurut KH. Abdurrahman Wahid.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Isnen Muhtarudin, berjudul “Hubungan Islam dengan Demokrasi di Indonesia (Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid)”. (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018). Penulisan skripsi ini sampai pada kesimpulan, bahwa demokrasi menurut KH. Abdurrahman Wahid mengedepankan toleransi dengan seluruh umat beragama dan menjalin komunikasi setra memperjuangkan hak-hak minoritas dimata hukum, kebebasan berpendapat, dan bebas berpergian kemana saja tidak ada cekalan dari pemerintah. Demokrasi tujuan dari pada syariat Islam seperti toleransi, pluralisme, persamaan dalam hidup berbangsa dan beragama. Demokrasi di Indonesia sudah sepatutnya berjalan dengan baik karena mayoritas umat Islam negara juga tidak harus memakai sistem yang Islami yang terpenting adalah menanamkan nilai-nilai Islam pada kehidupan sehari-hari dalam menjalankan demokrasi.⁴⁰

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

³⁹ Putri Tania, “Perspektif Abdurrahman Wahid Terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lamung, 2019.

⁴⁰ Isnen Muhtarudin, “Hubungan Islam dengan Demokrasi di Indonesia (Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid)”. *Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

peneliti. Dan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada pendidikan demokrasi Islami menurut KH. Abdurrahman Wahid.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library Research* yakni mengumpulkan, menelaah dan mengkaji data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.⁴¹

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi tokoh yaitu pengkajian dan telaah secara sistematis mengenai pemikiran seorang individu, secara holistik dengan melihat latar belakang internal, eksternal, perkembangan pemikiran, dan kontribusinya terhadap perkembangan zaman.⁴² Penelitian ini berusaha mengungkapkan pemikiran salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia, terutama dalam bidang agama, politik, dan kebudayaan. Beliau dikenal dengan pemikirannya yang luas, toleran, dan humanis yaitu KH. Abdurrahman Wahid.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi mengenai teori dan hasil penelitian, peneliti dapat mengkaji berbagai sumber. Dalam penelitian ini, sumber

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 329.

⁴² Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Pemikiran Tokoh (Pemikiran Islam)* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2002), hlm. 7.

data merujuk pada subjek dari mana data diperoleh. Peneliti menggunakan sumber kepustakaan, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber bacaan buku. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpulan penelitian. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- 1) Islam, Negara dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur, karya: KH. Abdurrahaman Wahid (1999).
- 2) Prisma Pemikiran Gus Dur, karya: KH. Abdurrahaman Wahid (2000).
- 3) Islamku Islam Anda Islam Kita, karya Abdurrahman Wahid (2011).
- 4) Menggerakkan Tradisi, karya Abdurrahman Wahid (2010).
- 5) Islam Negara dan Demokrasi, karya Abdurrahman Wahid (1999).
- 6) Fatwa dan Canda Gus Dur, karya Maman Imanulhaq Faqieh (2010).
- 7) Gus Dur Islam, Politik, dan Kebangsaan, karya Moh. Mahfud MD (2010).
- 8) Perjalanan Politik Gusdur, karya Abdul Munir Mul Khan (2010).
- 9) Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara, karya Ma'mun Murod Al-Brebesy (1999).

10) Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur, karya Masykur Musa Ali (2010).

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder yaitu data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data primer, yaitu buku-buku dan literatur yang relevan dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya yang mengkaji tentang pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengenai Pendidikan Demokrasi Islam. Sumber skunder penelitian ini adalah:

- 1) Partai Politik di Indonesia, karya Idzam Fautanu (2020).
- 2) Pemikiran Pendidikan Islam: Sumbangan Para Tokoh Pendidikan Islam Melalui Gagasan, Teori, dan Aplikasi, karya H. Asep Ahmad Sukandar dan Muhammad Hori (2018).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen, yaitu catatan-catatan tertulis atau visual yang disusun oleh individu atau lembaga untuk keperluan pengujian peristiwa, menyediakan sumber data, bukti, dan informasi ilmiah yang sukar ditemukan, seperti laporan resmi, surat-menyurat, foto, atau video, yang merekam kenyataan, bukti, atau informasi yang relevan dengan penelitian.⁴³

⁴³ Sedarmayanti dan Syaiful Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 2003), hlm. 86.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengaturan, pengurutan, pengelompokan, pemberian kode atau tanda, dan pengkategorian data. Tujuannya adalah untuk menemukan dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang terkumpul.

Dalam penelitian kepustakaan, teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data secara sistematis, mencermatinya secara kritis, dan menggunakan pendekatan filosofis. Melalui teknik ini, diharapkan dapat ditemukan gagasan atau teori yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis datanya adalah analisis isi (*Content Analysis*), yaitu penelitian terhadap informasi yang terdokumentasi dalam berbagai bentuk rekaman, baik gambar, suara, maupun tulisan.⁴⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Content Analysis* terhadap dokumen yang berupa tulisan. Adapun dokumen tersebut menjadi data primer dan data skunder tentang pendidikan demokrasi Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid.

⁴⁴ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 59.

BAB II

DEMOKRASI SUARA TERBANYAK MENURUT

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

Pemilu tahun 1977 awal dimulainya praktik pemilihan umum secara teratur setiap lima tahun. Pemilu 1977 diadakan pada masa pemerintahan Orde Baru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Pemilu 1977 ini juga terjadi penyederhanaan atau penggabungan partai politik, di mana sepuluh partai politik digabung menjadi tiga. Ketiga partai tersebut ialah PPP, PDI, dan Golkar yang terus berpartisipasi dalam pemilu hingga tahun 1997. Golkar kemudian tetap menjadi partai mayoritas dalam pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sejak Pemilu 1977, jumlah peserta pemilu menjadi lebih sedikit yaitu hanya tiga partai politik. Selain itu, hasil pemilu juga selalu sama, di mana Golkar selalu menjadi pemenang, sementara PPP dan PDI berperan sebagai pelengkap atau sekadar ornamen. Bahkan, Golkar telah menjadi pemenang sejak tahun 1971. Peserta pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997 masih sama yaitu Golkar, PPP dan PDI. Selama periode pemilu tersebut, Golkar selalu meraih suara terbanyak. Dalam Sidang Umum MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden dan menjabat selama 32 tahun. Namun, Wakil Presiden berganti setiap periode sesuai dengan hasil Sidang Umum MPR.⁴⁵

Selanjutnya setelah Pemilu 1997, sebagai akibat tergulingnya pemerintahan Presiden Soeharto, pemilu dijadwalkan lebih awal dan dilaksanakan

⁴⁵ Aermadepa, dkk, *Penegakan Hukum PEMILU di Indonesia (Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 7.

hanya berjarak 2 tahun setelah Pemilu 1997 yaitu pada tahun 1999. Padahal seharusnya pemilu berikutnya diadakan pada tahun 2002. Dengan waktu persiapan yang terbatas, pemilu 1999 diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu tersebut berjalan secara damai tanpa adanya kekacauan. Cara pembagian kursi dalam pemilihan kali ini masih menggunakan sistem proporsional tertutup dengan varian Roget. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi sesuai dengan perolehan suaranya di daerah pemilihan dengan proporsi yang seimbang. Namun, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kali ini, peringkat perolehan suara partai di daerah pemilihan digunakan untuk menentukan calon terpilih.

Jika pada pemilu 1977, calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih jika partai tersebut meraih kursi, sekarang calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang mencalonkan diri. Selanjutnya, berdasarkan hasil Sidang Umum MPR, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Abdurrahman Wahid - Megawati Soekarnoputri kemudian digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri - Hamzah Haz dalam sidang istimewa MPR RI pada tanggal 23 Juli 2001.⁴⁶

Pembangunan hukum di Indonesia harus dilakukan melalui proses demokrasi (kerakyatan) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. Demokrasi menghendaki pembuatan hukum dilakukan oleh rakyat atau lembaga

⁴⁶ Aermadepa, dkk, *Penegakan Hukum PEMILU di Indonesia*,... hlm. 8.

perwakilannya berdasar kehendak suara yang terbanyak. Sedangkan nomokrasi menghendaki pembangunan hukum dilakukan menurut prosedur tertentu yang fair serta menurut filosofi hukum dengan segala turunannya di dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan teori *Stupa (stuffenbau theorie)*. Hukum tidak bisa dibangun dengan menang-menangan suara semata atas nama demokrasi. Ia harus sesuai dengan filosofi dan logika peraturan perundang-undangan yang menyertainya sesuai dengan prinsip nomokrasi.⁴⁷

Sekitar 90 persen pemilih Indonesia datang untuk memberikan suara mereka pada 7 Juni 1999. Seperti yang bisa diduga, PDI-P memperoleh suara terbanyak (34 persen) dengan Golkar di urutan kedua (22 persen). Namun, kedua partai ini memperoleh alokasi kursi yang hampir sama di parlemen karena PDI-P memperoleh suara terbanyak dari Jawa, sedangkan Golkar memperoleh suara terbanyak dari luar Jawa. Pada bulan Oktober Habibie harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan parlemen. Pidato ini merupakan laporan mengenai kinerjanya sebagai presiden dan kinerja kebijakan selama masa kepresidenannya. Pidatonya ditolak oleh mayoritas anggota parlemen. Setelah penolakan ini Habibie memutuskan untuk mencabut pencalonannya sebagai presiden pada tahun 1999.

Dua kandidat muncul pada saat sidang MPR-RI, yakni Abdurrahman Wahid didukung oleh Poros Tengah, koalisi partai politik Islam dan Nasionalis, sedangkan Megawati Soekarnoputri didukung oleh PDI-P. Munculnya Abdurrahman Wahid menjadi calon dari Poros Tengah sebagai pengganti BJ

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Gus Dur Islam, Politik, dan Kebangsaan* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010), hlm. 106.

Habibie yang didukung Poros Tengah tetapi tidak bersedia maju setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI. Setelah melalui pemungutan suara secara tertutup yang dramatis dan disiarkan langsung oleh berbagai stasiun TV, akhirnya Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan. Abdurrahman Wahid memperoleh suara sebanyak 373, sedangkan Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan 313 suara. Suara lainnya adalah 9 suara abstain dan 4 suara tidak sah. Kemenangan Gus Dur atas Megawati merupakan ironi demokrasi Indonesia karena Abdurrahman Wahid berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meraih suara kecil pada pemilu legislatif 1999, sedangkan Megawati Soekarnoputri berasal dari PDI-P yang memenangkan legislatif 1999. Setelah MPR-RI berhasil memilih Presiden, dilanjutkan pemilihan Wakil Presiden pada 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia keempat dan Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia sehari kemudian.⁴⁸

Gagasan Fraksi Reformasi yang kemudian didukung Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk memilih K.H. Abdurrahman Wahid yang biasa dipanggil Gus Dur ini sebagai calon presiden di samping Megawati dan Yusril Ihza Mahendra (meskipun akhirnya mengundurkan diri dari pencalonan) merupakan fenomena yang cukup menarik bila dikaitkan dengan perkiraan perkembangan keagamaan di Indonesia (khususnya Islam) pada masa-masa mendatang, terutama pada awal milenium ketiga. Dukungan tiga fraksi yang kemudian didukung oleh Fraksi Bulan Bintang dan sebagian anggota Fraksi Golkar ternyata membuahkan hasil

⁴⁸ Idzam Fautanu, *Partai Politik di Indonesia* (Bandung: Program Studi S2 Agama, 2020), hlm. 104-105.

dengan terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI yang keempat. Kemenangan KH. Abdurrahman Wahid ini menyiratkan nuansa yang cukup kental bahwa ia telah dianggap sebagai figur yang relatif lebih mampu dibanding calon lain untuk mengatasi kebuntuan persoalan bangsa dalam berbagai dimensinya.

Pada gilirannya, terpilihnya Abdurrahman Wahid memberikan harapan yang cukup positif bagi perkembangan Islam di Indonesia yang bernuansa substantif neomodernistik yang pada gilirannya berdampak positif bagi perkembangan keagamaan di Indonesia secara umum. Artinya, terpilihnya Abdurrahman Wahid itu secara inklusif berarti penerimaan secara umum terhadap gagasan dan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid, dan dalam skala yang lebih luas juga penerimaan terhadap pemikiran-pemikiran Islam yang sealiran dengan yang dikemukakan KH. Abdurrahman Wahid. Bila kecenderungan ini menjadi suatu realitas, maka Islam yang akan berkembang subur di Bumi Indonesia adalah Islam beraliran substantif yang sangat menekankan pada aspek nilai dibandingkan dengan aspek simbol dan legal formal yang kaku.⁴⁹

Dari pemikiran dan gagasan KH. Abdurrahman Wahid yang ditawarkan selama ini, ada kesan kuat bahwa benang merah gagasannya mengacu kepada Islam yang berdimensi substansial. Hal itu dapat dilihat dari pandangannya mengenai Al Quran yang harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan kehidupan sosio-kultural yang terus berkembang.

⁴⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 19.

Kemungkinan berkembangnya Islam di Indonesia dengan warna neomodernisme memang memiliki peluang yang cukup besar baik dilihat dari sisi historis maupun dari sisi sosio-kultural keagamaan bangsa Indonesia. Dalam perspektif historis Indonesia tidak pernah memberikan harapan bagi berkembangnya gerakan-gerakan yang mengarah kepada pola-pola ekstrem dan berbau radikal. Harus diakui, gerakan-gerakan semacam itu beberapa kali muncul di pentas sejarah Indonesia, tetapi tidak pernah menjadi suatu gerakan besar yang mengakar pada masyarakat. Sifatnya lebih merupakan gerakan sempalan yang tercerai berai dan tidak pernah menjadi kelompok yang solid. Bahkan kalau dilihat dalam skala internasional, fenomena semacam itu yang juga telah terjadi. Gerakan-gerakan fundamentalis radikal tidak pernah mendapat simpati dari mayoritas umat Islam internasional.⁵⁰

Dalam perspektif sosial budaya, masyarakat Indonesia yang majemuk menuntut kondisi yang kondusif untuk pengembangan kehidupan mereka. Oleh karena itu, segala bentuk sikap, pandangan dan tindakan yang berlawanan dengan pluralitas kehidupan yang mereka alami akan mendapat tantangan dan sulit untuk diterima oleh mereka. Dari sini kita melihat bahwa sejak Islam datang ke Indonesia, pertama kali yang ditemui adalah kemajemukan dalam beragam dimensinya; etnis, budaya, dan agama. Realitas ini telah memberikan akar yang kukuh bagi perkembangan Islam substansial yang berwatak damai, toleran, dan inklusif di bumi pertiwi. Inilah wacana yang kemudian dikembangkan oleh Islam neomodernisme.

⁵⁰ Abdul Munir Mul Khan, *Perjalanan Politik Gus Dur*,... hlm. 20.

Dengan penerimaan bangsa Indonesia terhadap figur KH. Abdurrahman Wahid yang ditandai dengan terpilihnya dia sebagai Presiden, Islam neomodernisme dengan nuansa yang disebutkan itu akan semakin kukuh menancapkan misinya di Indonesia. Pada gilirannya, Islam yang berwatak garang dan eksklusif semakin tidak memiliki tempat untuk tumbuh apalagi berkembang di kalangan umat Islam di tanah persada. Kecenderungan ini memberikan harapan besar bagi penciptaan perdamaian yang langgeng, sehingga kesejahteraan bangsa akan lebih mudah untuk dicapai.

Adanya perkembangan yang menggembirakan ini seharusnya disikapi secara aktif oleh umat Islam, saudara-saudara kita dari agama lain, umat Nasrani, Buddha dan umat yang lain. Dalam perspektif ini, umat Islam hendaknya menyadari bahwa Islam substansial adalah pilihan terbaik untuk mengaktualisasikan nilai Islam ke dalam kehidupan tanpa harus dibatasi dengan slogan dan simbol formal yang kosong sehingga memberikan peluang yang sama bagi umat yang lain untuk sama-sama berkiprah membangun negara yang saat ini sedang terpuruk. Sedangkan umat yang lain, penerimaan bangsa ini terhadap KH. Abdurrahman Wahid sebaiknya dijadikan momentum untuk melakukan dialog dan kerja sama yang lebih intens dan transparan dengan kalangan Muslim. Dari dialog itu diharapkan akan muncul keterbukaan yang sebenarnya sehingga kecurigaan yang selama ini masih mengendap-dan dicoba ditutup-tutupi melalui tindakan yang direkayasa di hati masing-masing tidak akan berkembang lagi.⁵¹

⁵¹ Abdul Munir Mulkhan, *Perjalanan Politik Gus Dur*,...hlm. 21-22.

Yang jelas, terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden akan memberikan angin sejuk yang cukup segar bagi iklim keagamaan di Indonesia. Dengan pandangan Islamnya yang menganut pluralisme, ia akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua penganut agama di Indonesia untuk sama-sama berkiprah mengembangkan kreativitas mengantarkan bangsa ini duduk sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Namun, semuanya memang harus dimulai dari *husnuzhzhah* dan itikad baik dari semua pihak.⁵²

Demokrasi juga harus menjadi jalan menuju keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap keberagaman, bukan sekadar ajang perebutan suara terbanyak semata. Pandangan ini tetap relevan hingga saat ini, mengingat banyak negara masih bergulat dengan dilema antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial pembangunan hukum di Indonesia harus dilakukan melalui proses demokrasi (kerakyatan) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. Demokrasi menghendaki pembuatan hukum dilakukan oleh rakyat atau lembaga perwakilannya berdasar kehendak suara yang terbanyak. Sedangkan nomokrasi menghendaki pembangunan hukum dilakukan menurut prosedur tertentu yang fair serta menurut filosofi hukum dengan segala turunannya di dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan teori *Stupa (stuffenbau theorie)*. Hukum tidak bisa dibangun dengan menang-menangan suara semata atas nama demokrasi. Ia harus sesuai dengan filosofi dan logika peraturan perundang-undangan yang menyertainya sesuai dengan prinsip nomokrasi.⁵³

⁵² Abdul Munir Mulkhan, *Perjalanan Politik Gus Dur*,...hlm. 24-25.

⁵³ Moh. Mahfud MD, *Gus Dur Islam, Politik, dan Kebangsaan* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010), hlm. 106.

Sekitar 90 persen pemilih Indonesia datang untuk memberikan suara mereka pada 7 Juni 1999. Seperti yang bisa diduga, PDI-P memperoleh suara terbanyak (34 persen) dengan Golkar di urutan kedua (22 persen). Namun, kedua partai ini memperoleh alokasi kursi yang hampir sama di parlemen karena PDI-P memperoleh suara terbanyak dari Jawa, sedangkan Golkar memperoleh suara terbanyak dari luar Jawa. Pada bulan Oktober Habibie harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan parlemen. Pidato ini merupakan laporan mengenai kinerjanya sebagai presiden dan kinerja kebijakan selama masa kepresidenannya. Pidatonya ditolak oleh mayoritas anggota parlemen. Setelah penolakan ini Habibie memutuskan untuk mencabut pencalonannya sebagai presiden pada tahun 1999.⁵⁴

Dua kandidat muncul pada saat sidang MPR-RI, yakni Abdurrahman Wahid didukung oleh Poros Tengah, koalisi partai politik Islam dan Nasionalis, sedangkan Megawati Soekarnoputri didukung oleh PDI-P. Munculnya Abdurrahman Wahid menjadi calon dari Poros Tengah sebagai pengganti BJ Habibie yang didukung Poros Tengah tetapi tidak bersedia maju setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI. Setelah melalui pemungutan suara secara tertutup yang dramatis dan disiarkan langsung oleh berbagai stasiun TV, akhirnya Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan. Abdurrahman Wahid memperoleh suara sebanyak 373, sedangkan Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan 313 suara. Suara lainnya adalah 9 suara abstain dan 4 suara tidak sah. Kemenangan KH. Abdurrahman Wahid atas Megawati merupakan ironi demokrasi

⁵⁴ Idzam Fautanu, *Partai Politik di Indonesia* (Bandung: Program Studi S2 Agama, 2020), hlm. 104.

Indonesia karena Abdurrahman Wahid berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meraih suara kecil pada pemilu legislatif 1999, sedangkan Megawati Soekarnoputri berasal dari PDI-P yang memenangkan legislatif 1999. Setelah MPR-RI berhasil memilih Presiden, dilanjutkan pemilihan Wakil Presiden pada 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia keempat dan Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia sehari kemudian.⁵⁵

Kemungkinan berkembangnya Islam di Indonesia dengan warna neomodernisme memang memiliki peluang yang cukup besar baik dilihat dari sisi historis maupun dari sisi sosio-kultural keagamaan bangsa Indonesia. Dalam perspektif historis Indonesia tidak pernah memberikan harapan bagi berkembangnya gerakan-gerakan yang mengarah kepada pola-pola ekstrem dan berbau radikal. Harus diakui, gerakan-gerakan semacam itu beberapa kali muncul di pentas sejarah Indonesia, tetapi tidak pernah menjadi suatu gerakan besar yang mengakar pada masyarakat. Sifatnya lebih merupakan gerakan sempalan yang tercerai berai dan tidak pernah menjadi kelompok yang solid. Bahkan kalau dilihat dalam skala internasional, fenomena semacam itu yang juga telah terjadi. Gerakan-gerakan fundamentalis radikal tidak pernah mendapat simpati dari mayoritas umat Islam internasional.

Dalam perspektif sosial budaya, masyarakat Indonesia yang majemuk menuntut kondisi yang kondusif untuk pengembangan kehidupan mereka. Oleh karena itu, segala bentuk sikap, pandangan dan tindakan yang berlawanan dengan

⁵⁵ Idzam Fautanu, *Partai Politik di Indonesia*,...hlm. 105.

pluralitas kehidupan yang mereka alami akan mendapat tantangan dan sulit untuk diterima oleh mereka. Dari sini kita melihat bahwa sejak Islam datang ke Indonesia, pertama kali yang ditemui adalah kemajemukan dalam beragam dimensinya; etnis, budaya, dan agama. Realitas ini telah memberikan akar yang kukuh bagi perkembangan Islam substansial yang berwatak damai, toleran, dan inklusif di bumi pertiwi. Inilah wacana yang kemudian dikembangkan oleh Islam neomodernisme.

Dengan penerimaan bangsa Indonesia terhadap figur Gus Dur yang ditandai dengan terpilihnya dia sebagai Presiden, Islam neomodernisme dengan nuansa yang disebutkan itu akan semakin kukuh menancapkan misinya di Indonesia. Pada gilirannya, Islam yang berwatak garang dan eksklusif semakin tidak memiliki tempat untuk tumbuh apalagi berkembang di kalangan umat Islam di tanah persada. Kecenderungan ini memberikan harapan besar bagi penciptaan perdamaian yang langgeng, sehingga kesejahteraan bangsa akan lebih mudah untuk dicapai.

Adanya perkembangan yang menggembirakan ini seharusnya disikapi secara aktif oleh umat Islam, saudara-saudara kita dari agama lain, umat Nasrani, Buddha dan umat yang lain. Dalam perspektif ini, umat Islam hendaknya menyadari bahwa Islam substansial adalah pilihan terbaik untuk mengaktualisasikan nilai Islam ke dalam kehidupan tanpa harus dibatasi dengan slogan dan simbol formal yang kosong sehingga memberikan peluang yang sama bagi umat yang lain untuk sama-sama berkiprah membangun negara yang saat ini sedang terpuruk. Sedangkan umat yang lain, penerimaan bangsa ini terhadap KH.

Abdurahman Wahid sebaiknya dijadikan momentum untuk melakukan dialog dan kerja sama yang lebih intens dan transparan dengan kalangan Muslim. Dari dialog itu diharapkan akan muncul keterbukaan yang sebenarnya sehingga kecurigaan yang selama ini masih mengendap-dan dicoba ditutup-tutupi melalui tindakan yang direkayasa di hati masing-masing tidak akan berkembang lagi.

Yang jelas, terpilihnya KH. Abdurahman Wahid sebagai Presiden akan memberikan angin sejuk yang cukup segar bagi iklim keagamaan di Indonesia. Dengan pandangan Islamnya yang menganut pluralisme, ia akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua penganut agama di Indonesia untuk sama-sama berkiprah mengembangkan kreativitas mengantarkan bangsa ini duduk sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Namun, semuanya memang harus dimulai dari *husnuzhzhah* dan itikad baik dari semua pihak.⁵⁶

KH. Abdurrahman Wahid menekankan bahwa demokrasi tidak hanya sekadar mekanisme pemilihan berdasarkan suara terbanyak, tetapi harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, jika demokrasi hanya dipahami sebagai perolehan suara mayoritas tanpa mempertimbangkan aspek moral dan etika, maka sistem ini dapat melahirkan ketidakadilan sosial. Demokrasi seharusnya tidak hanya memberikan ruang bagi kelompok mayoritas untuk menentukan arah kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas, mendapatkan perlindungan yang setara di dalam sistem pemerintahan. KH. Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa prinsip ini sangat

⁵⁶ Abdul Munir Mulkhan, *Perjalanan Politik Gus Dur* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 19-25

penting dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, di mana keberagaman suku, agama, dan budaya menuntut sistem demokrasi yang lebih inklusif dan tidak sekadar berpihak kepada mayoritas.⁵⁷

Selain itu, kritik KH. Abdurrahman Wahid terhadap demokrasi suara terbanyak juga berakar pada keyakinannya bahwa demokrasi harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ia menolak gagasan bahwa keputusan politik hanya ditentukan oleh jumlah suara, tanpa memperhitungkan nilai moral dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Demokrasi yang hanya mengutamakan suara terbanyak dapat memunculkan potensi diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang jumlahnya lebih kecil. Oleh karena itu, dalam pandangannya, demokrasi yang ideal harus mencerminkan semangat musyawarah dan keadilan sosial, bukan sekadar hasil perhitungan angka. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi substantif yang tidak hanya menitikberatkan pada prosedur elektoral, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara.⁵⁸

Berbagai pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi telah dikaji oleh banyak ahli, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Mahfud MD

KH. Abdurrahman Wahid melihat kejujuran sebagai pilar utama dalam membangun demokrasi yang sehat. Tanpa kejujuran, tidak mungkin tercipta kepercayaan di antara masyarakat, yang merupakan syarat mutlak bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis.

⁵⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 33.

⁵⁸ Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara, dan Demokrasi, ...* hlm. 33.

2. Menurut Gaffar

KH. Abdurrahman Wahid sangat menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini. Pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat harus bersama-sama berperan dalam membentuk karakter individu yang jujur. Gus Dur juga melihat agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter yang jujur. Ajaran agama, menurutnya, dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat untuk bertindak jujur dan adil.⁵⁹

Berdasarkan pernyataan Mahfud MD dan Gaffar, dapat disimpulkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid memiliki pandangan yang sangat kuat tentang demokrasi sebagai sistem yang menempatkan kemanusiaan di pusatnya. Beliau melihat demokrasi bukan hanya sebagai sebuah sistem politik, melainkan sebagai cara hidup yang menghargai perbedaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta berkomitmen pada kesejahteraan rakyat.

Menurut K.H. Abdurrahman Wahid, demokrasi suara terbanyak haruslah diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan penegakan keadilan, bukan sekadar kemenangan angka. Beliau menekankan pentingnya musyawarah dan toleransi dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam praktik demokrasi di masyarakat, seringkali kemenangan suara terbanyak diartikan sebagai legitimasi penuh untuk mengabaikan suara minoritas, sehingga memicu polarisasi dan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara idealisme demokrasi yang diusung KH. Abdurrahman Wahid dengan realitas praktik demokrasi di lapangan.

⁵⁹ Izatul A'yun Salik dan Mohammad Salik, "Pendidikan Toleransi antar Umat Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam (Menelusuri Pemikiran Gus Dur)", *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 126.

BAB III

PENDIDIKAN KEJUJURAN DALAM DEMOKRASI MENURUT

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sosok yang dikenal dengan pemikirannya yang luas dan toleran, sangat menekankan pentingnya pendidikan kejujuran dalam konteks demokrasi. Bagi beliau, kejujuran bukanlah sekadar nilai moral semata, tetapi merupakan fondasi yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis.

Keberanian untuk memberikan tempat kepada rakyat kecil untuk turut mengendalikan arah kehidupan bernegara, melalui penegakan hak-hak asasi dan pengembangan demokrasi secara jujur dan tulus adalah prasyarat utamanya. Kesiapan memberikan kebebasan membicarakan masalah ini secara terbuka serta jujur merupakan titik mula penjagaan kemurnian ideologi negara dan keutuhan konstitusi. Dari kesiapan menegakkan demokrasi secara murni itu akan muncul proses penetapan prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan rakyat di tingkat bawah kehidupan masyarakat. Prasyarat tersebut hanya dapat dicapai jika kekuasaan pemerintahan tunduk kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan di luar lingkungannya sendiri, termasuk “lembaga” hak pilih yang bersifat universal dan ditegakkan secara jujur.⁶⁰

Adapun pandangan KH. Abdurrahman Wahid mengenai pendidikan kejujuran dalam demokrasi, yaitu:

1. Kejujuran sebagai Pilar Demokrasi

⁶⁰ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 18.

Abdurrahman Wahid melihat kejujuran sebagai pilar utama dalam membangun demokrasi yang sehat. Tanpa kejujuran, tidak mungkin tercipta kepercayaan di antara masyarakat, yang merupakan syarat mutlak bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Keberanian untuk memberikan tempat kepada rakyat kecil untuk turut mengendalikan arah kehidupan bernegara, melalui penegakan hak-hak asasi dan pengembangan demokrasi secara jujur dan tulus adalah prasyarat utamanya.⁶¹

Adil menurut Abdurrahman Wahid yaitu adil dalam segala hal, menciptakan keadilan dengan menegakkan hukum yang ada secara adil. Jadi bukan hanya adil dalam ebrpolitik, untuk membangun Negara Indonesia Abdurrahman Wahid merupakan figur demokrasi pada masanya dan merupakan bapak pluralisme di Indonesia. Menyamakan hak bagi seluruh masyarakat, Abdurrahman wahid memberikan kebebasan bagi keturunan tionghoa dalam menganut agama mereka. Abdurrahman Wahid demi mewujudkan demokrasi menegakkan keadilan dengan memberantas para korptor.⁶²

2. Pendidikan Kejujuran Sejak Dini

KH. Abdurahman Wahid sangat menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini. Pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat harus bersama-sama berperan dalam membentuk karakter individu yang jujur.

KH. Abdurahman Wahid juga melihat agama memiliki peran penting dalam

⁶¹ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000), hlm. 18.

⁶² Abdul Munir Mulkhan, *Perjalanan Politik Gus Dur*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 62.

membentuk karakter yang jujur. Ajaran agama, menurutnya, dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat untuk bertindak jujur dan adil.⁶³

Ketika ditanya wartawan di Malaysia pada awal November 1999 tentang hubungan agama dan negara, KH. Abdurahman Wahid menyatakan bahwa agama adalah sebagai “akhlak” atau “etika”, bukan ideologi yang digunakan untuk mengislamkan negara. Oleh karena itu, akhlak dan etika menjadi prioritas penting dalam kacamata KH. Abdurahman Wahid untuk membentuk masyarakat madani yang tenteram, damai, dalam sebuah tata nilai yang dihormati bersama. Dan jika ditarik dalam domain pendidikan, pendidikan Islam dalam hal ini, perspektif KH. Abdurahman Wahid tentang etika dan moral yang menjadi tujuan akhirnya. Bagi KH. Abdurahman Wahid, seperti dikemukakan oleh Ali Masykur Musa, sebuah masyarakat Islam tidak perlu ada dalam sebuah negeri, termasuk Indonesia. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai keislaman itu dapat diabsorpsi dalam konteks realitas kehidupan nyata. Tentu pendidikan Islam termasuk di dalamnya. Urgensi pendidikan Islam terletak pada aplikasinya dalam tatanan kehidupan nyata, sehingga ruh pendidikan itu menjadi lebih penting daripada formalitas fisik yang nampak di luar. Menjadikan agama sebagai sumber inspirasi orang beragama dan bernegara adalah lebih penting sifatnya. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Fachruddin, bahwa pemikiran KH. Abdurahman Wahid termasuk pendidikan Islam bertujuan untuk

⁶³ Izatul A'yun Salik dan Mohammad Salik, “Pendidikan Toleransi antar Umat Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam (Menelusuri Pemikiran Gus Dur), *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 126.

merealisasikan nilai-nilai moral, kemanusiaan, kejujuran, keadilan, kesederhanaan serta demokrasi.

Menurut KH. Abdurrahman Wahid, pendidikan etika dan moral saat ini seakan diabaikan. Sehingga banyak sarjana dengan berbagai gelar tapi tidak memiliki etika dan moral. Pentingnya akhlak ini sebenarnya terkait erat dengan misi yang diemban oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. KH. Abdurrahman Wahid berpendapat, penyempurnaan itu berjalan karena akhlak mulia yang sudah dirintis dan dijaga oleh para ulama ini akan mengalami proses klasifikasi, bukan dalam bentuk lahirnya, akan tetapi kualitasnya, karena akhlak itu sendiri akan dituntut semakin melebar wawasannya, semakin luas jangkauannya. Ada empat sistem yang bisa menegakkan Indonesia di masa depan. Keempat sistem tersebut, menurut KH. Abdurrahman Wahid, pertama, adalah sistem politik, kedua, sistem ekonomi, ketiga, sistem pendidikan, dan keempat, adalah sistem etika/moral atau akhlak. Keempat sistem tersebut memiliki peranan dan cakupan masing-masing. Yang perlu ditegaskan adalah bahwa di antara masing-masing sistem tersebut tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Sistem politik yang kuat, membutuhkan bangunan yang di atasnya tertata ekonomi yang kokoh yang ditegaskan atas semangat moral dan etika yang luhur melalui pendidikan. Pemikirannya yang pluralis, kontroversial, dan mempunyai pandangan yang jauh ke depan tidak bisa dielakkan mempunyai andil yang besar dalam pembangunan masyarakat di Indonesia, lebih-lebih

pada sebuah institusi pendidikan Islam yang memiliki akar sejarah yang berbeda-beda.⁶⁴

Konsep dan gagasan KH. Abdurahman Wahid tentang sistem pendidikan secara jelas terlihat pada gagasannya tentang pembaharuan pesantren. Sebagaimana dituturkan oleh Muslim Abdurrahman, bahwa KH. Abdurahman Wahid tiap kali bertemu dengan para intelektual pada disiplin ilmu apapun selalu mencoba untuk menyisipkan pesantren sebagai sebuah tawaran, baik secara keilmuan, peran dan fungsinya, maupun coraknya yang memiliki keunikan tersendiri. Ilmu dalam hal modernisasi ini ia berlandaskan pada *maqalah* “Memelihara dan melestarikan nilai-nilai lama yang masih relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih relevan.”⁶⁵

Terkait tujuan pendidikan Islam, KH. Abdurahman Wahid berpandangan bahwa muara akhir dari proses pendidikan adalah menjadikan manusia sebagai *insan kamil* yang berjiwa sosial tinggi terhadap sesama manusia dan alam. Buku Islam Kosmopolitan yang ditulis oleh KH. Abdurahman Wahid telah menginspirasi akan pentingnya pendidikan karakter bangsa. Hal ini bisa kita lihat dari kutipan berikut;

“Akan tetapi selama ini pendidikan di Indonesia dinilai gagal dalam mengemban tugasnya. Begitu juga yang terjadi pada pendidikan agama yang seharusnya mengambil peran sentral dalam membangun karakter masyarakat dalam kehidupan nyata. Ajaran agama yang meliputi berbagai bidang, seperti hukum (fikih),

⁶⁴ H. Asep Ahmad Sukandar dan Muhammad Hori, *Pemikiran Pendidikan Islam: Sumbangan Para Tokoh Pendidikan Islam Melalui Gagasan, Teori, dan Aplikasi* (Bandung: CV. Cendekia Press, 2018), hlm. 223-224.

⁶⁵ H. Asep Ahmad Sukandar dan Muhammad Hori, *Pemikiran Pendidikan Islam*,... hlm. 227.

keimanan (tauhid), etika (akhlak) sering disempitkan hanya kesusilaan belaka dan dalam sikap hidup.”

Dalam hal proses pendidikan, KH. Abdurahman Wahid juga sangat menekankan pada pendidikan karakter peserta didik. Hal ini bisa kita lihat dari pendapat yang dikemukakannya melalui tulisan beliau berjudul “Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat” sebagai berikut:

“Proses belajar dan mengajar di lingkungan pondok pesantren bukanlah sekedar menguasai ilmu-ilmu keagamaan, melainkan juga proses pembentukan pandangan hidup dan perilaku para santri itu nantinya setelah kembali dari pondok pesantren ke dalam kehidupan masyarakat”. Demikian pula sikap pemaaf juga disebutkan sebagai tanda kebaikan seorang muslim. Sebuah ayat menyatakan “Apa yang mengenai diri kalian dari (sekian banyak) musibah yang menimpa, (tidak lain merupakan) hal-hal berupa buah tangan kalian sendiri. Dan (walaupun demikian) Allah memaafkan sebagian (besar) hal-hal itu. (QS. Al Syura (42):30). Firman Allah ini mengharuskan kita juga mudah memberikan maaf kepada siapa pun, sehingga sikap saling memaafkan adalah sesuatu yang secara inherent menjadi sifat seorang muslim.”⁶⁶

Pengutamakan kemaslahatan umum dituntut dalam bentuknya yang operasional, bukan dalam sekedar dalam prinsip global. Salah satu kaidah fiqh adalah kebijakan pemimpin (pemerintahan) harus didasarkan pada kepentingan orang banyak. Menurut KH. Abdurahman Wahid, kata tarbiyah yang telah dipersempit maknanya itu mencerminkan juga proses kompensatoris tersebut. Umat Islam merasakan, proses modernisasi pendidikan telah membawa ancaman bagi mereka, antara lain: revitalisasi nilai, memudarnya keyakinan, lunturnya keluhuran budi dan susila, dan seterusnya. Padahal nilai, keyakinan, susila, budi pekerti, dan nilai-nilai spiritualitas lainnya adalah penopang berlangsungnya ketaatan pada hukum

⁶⁶ Siti Kusriani, *Jejak Pemikiran Pendidikan*, ... hlm. 23.

agama, ketundukan pada kebenaran akidah dan kesediaan memelihara akhlak mulia.

Ketika ditanya wartawan di Malaysia pada awal November 1999 tentang hubungan agama dan negara, KH. Abdurahman Wahid menyatakan bahwa agama adalah sebagai “akhlak” atau “etika”, bukan ideologi yang digunakan untuk mengislamkan negara. Oleh karena itu, akhlak dan etika menjadi prioritas penting dalam kacamata KH. Abdurahman Wahid untuk membentuk masyarakat madani yang tenteram, damai, dalam sebuah tata nilai yang dihormati bersama. Dan jika ditarik dalam domain pendidikan, pendidikan Islam dalam hal ini, perspektif KH. Abdurahman Wahid tentang etika dan moral yang menjadi tujuan akhirnya. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Fachruddin, bahwa pemikiran KH. Abdurahman Wahid termasuk pendidikan Islam bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai moral, kemanusiaan, kejujuran, keadilan, kesederhanaan serta demokrasi.⁶⁷

Bagi KH. Abdurahman Wahid, demokrasi berarti persamaan hak dan status dari setiap warga Negara di depan hukum, tanpa melihat perbedaan etnis, agama, jenis kelamin, dan bahasa. KH. Abdurahman Wahid ingin menegaskan bahwa dengan demokrasi setiap agama diberikan hak dan posisi yang sama untuk berkarya dan mengeluarkan pendapat dalam menyelesaikan persoalan bersama. Terfokus dengan demokrasi di Indonesia khususnya, KH. Abdurahman Wahid menyoroti nilai-nilai dasar yang berhubungan

⁶⁷ Siti Kusriani, *Jejak Pemikiran Pendidikan*, ... hlm. 22-24.

dengannya seperti kemanusiaan, persamaan dan keadilan. Hubungan antar manusia ini sangat penting karena tidak akan mungkin di era, di mana modernisasi sedang berkembang seorang manusia tidak berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan. Dalam hal ini KH. Abdurrahman Wahid sering mengutip ayat Al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 13 yang intinya adalah sesungguhnya perbedaan manusia adalah kehendak Tuhan yang memiliki karakter untuk saling mengenal satu sama lain.

Selanjutnya adalah untuk mendukung persamaan, khususnya dalam bidang sosial politik dan ekonomi, Abdurrahman Wahid dalam hal ini tidak ingin mengatakan istilah “mayoritas atau minoritas” karena setiap manusia memiliki persamaan status dan hak yang sama. Dengan kata lain, untuk mencapai demokrasi dalam sosial politik dan ekonomi dan keadilan sosial, setiap orang harus menanamkan persamaan, menghormati kaum mayoritas, ras serta kelompok agama lain atau kaum minoritas. Abdurrahman Wahid membela terhadap minoritas, itu terlihat ketika Abdurrahman Wahid memberikan pembelaan terhadap keluarga Kong Hu Chu.⁶⁸

Menurut Abdurrahman Wahid, keadilan adalah sangat penting dalam mendukung kehidupan sosial dan politik yang harmonis sehingga tidak ada perbedaan dan klasifikasi sosial serta kesenjangan sosial yang dapat berakibat pada terjadinya ketegangan dan bermuara pada konflik. Dalam hal kaitan agama dan demokrasi, KH. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa agama harus menunjukkan fungsi transformatifnya bagi demokratisasi kehidupan

⁶⁸ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 182.

sosial. Dalam hal ini, agama menurutnya, harus memformulasikan konsepsi tentang martabat manusia, persamaan status manusia di depan hukum, dan solidaritas sejati antar umat manusia. Setiap agama harus berinteraksi dengan agama lain dalam bentuk penerimaan sejumlah nilai-nilai dasar yang universal, yang akan membawa hubungan antar agama dalam sebuah tahapan, di mana agama melayani masyarakat dalam sebuah bentuk yang sangat konkret, seperti menanggulangi kemiskinan, menegakkan hukum dan menjamin kebebasan berpendapat.⁶⁹

Argumentasi utama KH. Abdurahman Wahid tentang tuntutan penerapan nilai kejujuran dalam kehidupan kebangsaan adalah karena nilai kejujuran itu merupakan kunci penting bagi pemecahan masalah-masalah bangsa. KH. Abdurahman Wahid menyatakan, “Kejujuran merupakan kunci pemecahan masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dewasa ini. Dengan kejujuran inilah kita akan mengatasi krisis multidemisonal. Ukuran kejujuran inilah yang akan menentukan kualitas kita sebagai bangsa.”⁷⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejujuran menurut K.H. Abdurrahman Wahid adalah fondasi utama dalam demokrasi. Beliau meyakini bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika masyarakatnya menjunjung tinggi kejujuran, baik dalam perkataan maupun perbuatan. KH. Abdurahman Wahid juga menekankan

⁶⁹ Surya Adi Sahfutra, “Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur untuk Kesetaraan dan Kerukunan”, *Jurnal Religi*, Vol. 10, No. 1 (2014), hlm. 97-98.

⁷⁰ Wildah Nurul Islami dan M. Sholahuddin, “Membumikan Konsep Etika Islam dan Relevansinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Telaah Pemikiran Transformatif Abdurrahman Wahid)”, *Jurnal Staiarrosyid*, (2020), hlm. 9.

bahwa pendidikan kejujuran harus dimulai sejak dini dan diintegrasikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan agama.

Namun, dalam praktik demokrasi di masyarakat, kejujuran seringkali terabaikan. Politik identitas, hoaks, dan manipulasi informasi menjadi tantangan serius yang menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Korupsi dan praktik-praktik tidak jujur lainnya juga masih marak terjadi, menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme demokrasi yang diusung KH. Abdurahman Wahid dengan realitas yang terjadi di lapangan.

BAB IV

DEMOKRASI LANGSUNG MENURUT K.H. ABDURRAHMAN WAHID

Sejak tahun 1980-an, KH. Abdurrahman Wahid telah mengambil posisi berhadapan langsung dengan kekuasaan Orde Baru. Dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di mana ia tiga kali menjadi Ketua Umumnya, KH. Abdurrahman Wahid berada di garda depan menjadi kelompok pengimbang dengan kekuatan besar di luar negara (*civil society*). Tahun 1990 KH. Abdurrahman Wahid bersama dengan tokoh nasional membentuk Forum Demokrasi (Fordem) di mana ia menjadi ketuanya. Organisasi ini langsung mendapatkan perhatian tinggi terutama oleh pemerintah karena kritis terhadap kebijakan penguasa. Lebih-lebih karena saat itu, KH. Abdurrahman Wahid sebagai ulama Pesantren dan tokoh Islam tidak bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibentuk pemerintah.⁷¹

Perjuangan demokrasi paling berat oleh KH. Abdurrahman Wahid adalah sepanjang tahun 1998, di mana reformasi mulai bergulir. Di saat kondisi bangsa mulai goyah, KH. Abdurrahman Wahid berperan penting dengan memberikan sumbangan besar mulai dari mengeluarkan keprihatinan moral, memberikan masukan saat di undang Presiden Soeharto hingga membentuk koalisi moral mendorong terjadinya reformasipun saat KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden.⁷²

⁷¹ Maman Imanulhaq Faqieh, *Fatwa dan Canda Gus Dur* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 164.

⁷² Maman Imanulhaq Faqieh, *Fatwa dan Canda Gus Dur*,...hlm. 164-165.

Perjuangan KH. Abdurrahman Wahid mengembangkan demokrasi adalah dengan langsung mereformasi militer, pihak yang selama Orde Baru berkuasa penuh. Ia mengembalikan militer sebagai sarana untuk mempertahankan bangsa dan menjaga stabilitas di dalamnya serta tidak lagi berada di wilayah politik. Kebijakan KH. Abdurrahman Wahid ini adalah langkah awal dimana supremasi sipil ditegakkan.

Konsep dan gerakannya yang mengayomi seluruh elemen bangsa sungguh relevan di setiap relung waktu dan kehidupan. Meneruskan KH. Abdurrahman Wahid adalah meneruskan konsep dan gerakannya terutama dalam membangun keadilan dan toleransi bagi semua. Keunggulan KH. Abdurrahman Wahid yang patut dilanjutkan dalam hal konsolidasi demokrasi adalah mengembangkan doktrin agama sebagai rahmat bagi sesama (*Rahmatan Li Al-'Alamin*). Membangun pemahaman keagamaan selaras dengan perkembangan kekinian sehingga mampu menjawab problem kemanusiaan.

Secara sederhana, demokrasi langsung adalah sistem pemerintahan di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, tanpa perantara perwakilan. KH. Abdurrahman Wahid memandang demokrasi langsung sebagai ideal yang sulit dicapai dalam masyarakat modern yang kompleks. Namun, beliau tetap meyakini pentingnya melibatkan rakyat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.⁷³

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.

⁷³ Maman Imanulhaq Faqieh, *Fatwa dan Canda Gus Dur*,...hlm. 165.

Dalam sistem ini, setiap rakyat memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu Negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

Demokrasi langsung menurut KH. Abdurrahman Wahid adalah sistem di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Ini berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara dan dapat secara langsung menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil.⁷⁴

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu Negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat

⁷⁴ Azman Arsyad, "Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2019), hlm. 77.

sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

Demokrasi langsung menurut KH. Abdurrahman Wahid adalah sistem di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Ini berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara dan dapat secara langsung menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil.⁷⁵

Pesan Abdurrahman Wahid tentang pemilu yang dapat kita jadikan panutan sampai sekarang ini yaitu melalui pemilu kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, kita ingin memberikan persamaan hak bagi semua warga Negara tanpa pandang bulu asal-usul agama, asal-usul organisasi, asal-usul RAS dan asal-usul daerahnya serta asal-usul suku dan lain-lainnya.⁷⁶

Membangun pemerintahan yang bersih, untuk membangun pemerintahan yang bersih maka seseorang yang mencalon jadi pemerintah haruslah orang yang bersih. Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden dengandipilih melalui perwakilan yang diwakilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Pemikiran yang kotor lahir bagi para politisi, inilah perbandingan antara demokrasi pancasila dengan demokrasi langsung. Abdurrahman Wahid adalah sosok pemimpin yang paling merakyat dan egaliter. Lembaga kepresidenan dia buat menjadi lembaga yang tidak sesakral pada zaman pendahulunya, istana seakan-akan milik semua orang.⁷⁷

⁷⁵ Azman Arsyad, "Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2019), hlm. 77.

⁷⁶ Abdurrahman Wahid, *Islam Negara dan Demokrasi*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. 101.

⁷⁷ Abdul Munir Mulkhan, *Perjalanan Politik Gus Dur*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 203.

Hal tersebut sesuai dengan demokrasi langsung karena semua rakyat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang berkuasa. Karena itu pemerintah harus memberikan tempat bagi perbedaan pendapat dan kemerdekaan berbicara, artinya adalah kebebasan menyatakan pikiran tanpa dikekang sama sekali.⁷⁸

Tetapi demokrasi langsung yang terjadi saat ini sedikit di selewengkan oleh para pemerintah. Seharusnya demokrasi langsung ini memberikan jaminan kepada masyarakat sesuai dengan misi Islam memberikan jaminan atas keselamatan keyakinan bagia semua rakyat, keselamatan profesi dan lain-lain.⁷⁹

Dengan terlaksananya demokrassi langsung seluruh rakyat mendapatkan perlakuan yang sama, sama-sama memiliki hak untuk pergi ke TPS, mendapatkan perlakuan yang baik dari para petugas TPS. Tidak ada rakyat yang mendapatkan perlakuan istimewa, siapapun orangnya akan di perlakukan dengan sama. Aspirasi rakyat harus didengarkan, semua rakyat sama baik berdasarkan suku, agama maupun RAS sama-sama memiliki aspirasi yang harus dipertimbangkan untuk mengambil keputusan.⁸⁰

⁷⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: Democracy Projeck, 2011), hlm. 51.

⁷⁹ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010), hlm. 199.

⁸⁰ Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: PT. gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 114.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH. Abdurrahman Wahid, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Demokrasi suara terbanyak menurut KH. Abdurrahman Wahid. Beliau menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar soal jumlah suara, tetapi juga soal substansi dan nilai-nilai kemanusiaan. Beliau meyakini bahwa demokrasi harus mengakomodasi perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Meskipun suara terbanyak sering menjadi penentu dalam sistem demokrasi, KH. Abdurrahman Wahid mengingatkan bahwa keputusan yang diambil harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi yang inklusif dan berbasis kemanusiaan ini menjadikannya sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah demokrasi Indonesia, dan pandangan-pandangannya masih relevan hingga saat ini.
2. K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meyakini bahwa pendidikan kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat. Beliau menekankan pentingnya menanamkan nilai kejujuran sejak dini, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kejujuran, menurut KH. Abdurrahman Wahid, bukan hanya sekadar nilai moral, melainkan juga pilar utama kepercayaan dalam kehidupan bernegara. Pemilu yang jujur

dan adil, serta penegakan hukum yang tegas adalah manifestasi dari demokrasi yang berbasis kejujuran. KH. Abdurahman Wahid juga melihat agama sebagai sumber inspirasi untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran. Pendidikan agama, menurutnya, harus diarahkan untuk membentuk karakter individu yang jujur dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan kejujuran menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera.

3. K.H. Abdurrahman Wahid memandang demokrasi langsung sebagai ideal yang sulit dicapai, namun tetap penting untuk melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Meskipun beliau tidak pernah mengalami pemilihan langsung secara langsung, KH. Abdurahman Wahid sangat mendukung sistem ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Beliau menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kebebasan dalam pelaksanaan demokrasi langsung. KH. Abdurahman Wahid juga melihat pendidikan sebagai kunci untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas, di mana masyarakat dapat memilih pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab. Meskipun demokrasi langsung memiliki tantangan, seperti potensi manipulasi dan biaya yang tinggi, KH. Abdurahman Wahid tetap meyakini bahwa sistem ini adalah cara terbaik untuk membangun pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

B. Implikasi Penelitian

Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang demokrasi suara terbanyak memberikan implikasi penting bagi pengembangan sistem demokrasi di Indonesia. KH. Abdurrahman Wahid menekankan bahwa esensi demokrasi tidak hanya terletak pada kemenangan suara mayoritas, tetapi juga pada perlindungan hak-hak minoritas dan penegakan keadilan bagi semua pihak. Hal ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan dan toleransi dalam praktik demokrasi, serta perlunya keseimbangan antara kepentingan mayoritas dan perlindungan kelompok-kelompok yang rentan. Pemikiran ini menantang pemahaman demokrasi yang semata-mata berfokus pada kemenangan angka, dan mendorong pengembangan demokrasi yang lebih inklusif.

Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang pendidikan kejujuran dalam demokrasi menekankan perlunya integrasi nilai-nilai kejujuran sejak dini dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan moral dan etika yang mengutamakan kejujuran akan membentuk individu-individu yang berintegritas, yang sangat penting untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan. KH. Abdurrahman Wahid meyakini bahwa kejujuran adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, mengatasi krisis multidimensional, dan memperkuat kepercayaan publik dalam proses politik. Oleh karena itu, pendidikan etika yang berkelanjutan, dengan melibatkan agama sebagai sumber inspirasi, harus diintegrasikan di semua jenjang

pendidikan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya terampil tetapi juga bertanggung jawab secara moral.

Pemikiran KH. Abdurahman Wahid tentang demokrasi langsung mengimplikasikan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam menentukan arah kebijakan negara. Meskipun demokrasi langsung sebagai sistem ideal sulit diterapkan dalam masyarakat modern, prinsip-prinsip seperti musyawarah mufakat, perlindungan hak minoritas, dan keadilan hukum yang setara tetap relevan untuk diterapkan dalam demokrasi Indonesia. Demokrasi yang transparan, bersih dari korupsi, dan dipimpin oleh pemimpin yang memberikan teladan dalam ketaatan hukum adalah fondasi penting untuk pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan rakyat. Semangat partisipasi aktif rakyat yang ditanamkan oleh KH. Abdurahman Wahid tetap menjadi pedoman untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.

C. Saran

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH. Abdurrahman Wahid.

2. Bagi Masyarakat Umum

Bagi Masyarakat Umum diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk memahami bagaimana Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH. Abdurrahman Wahid.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai Pendidikan Demokrasi Islami Menurut KH. Abdurrahman Wahid.

DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa, dkk. (2024). *Penegakan Hukum PEMILU di Indonesia (Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokras)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali. M. (2021). *Demokrasi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Ali. M. M. (2010). *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: PT. gelora Aksara Pratama.
- Al-Qurtubi. A. A. M. B. A. (1995). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arsyad. A. (2019). "Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan". *Jurnal Al-Qadau*. 6 (1).
- Awalia. R. (2021). "Konsep Pendidikan Islam dalam Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid", *Skripsi*. IAIN Parepare.
- Azman. A. (2019). "Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan". *Jurnal Al-Qadau*. 16 (1).
- Barton. G. (2002). *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: PT. LKiS.
- Efendi. (2016). *Pendidikan Islam Transformatif: Ala. KH. Abdurrahman Wahid*. GUEPEDIA.
- Faqieh. M. I. (2010). *Fatwa dan Canda Gus Dur*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Fautanu. I. (2020). *Partai Politik di Indonesia*. Bandung: Program Studi S2 Agama.
- Furchan. A & Agus. M. (2005). *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gafur. M. A. (2020). *Gus Dur Multikulturalisme & Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Husamah, dkk. (2019). *Pengantar Pendidikan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Iftitah, NR. (2014). "Islam dan Demokrasi". *Jurnal Studi Islam*. 1 (1).
- Ilyas. M. Z. R & Afdhol. A. H. (2022). *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

- Islami. W. N & M. S. (2020). “Membumikan Konsep Etika Islam dan Relevansinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Telaah Pemikiran Transformatif Abdurrahman Wahid). *Jurnal Staiarrosyid*.16 (1).
- Kathir. I. B. U. I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim (Tafsir Ibnu Kathir) Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kusrini. S. (2021). *Jejak Pemikiran Pendidikan Ulama Nusantara: Genealogi, Historiografi, dan Kontekstualisasi Pendidikan Islam di Nusantara*. Semarang: CV. Asna Pustaka.
- Ma'mun. M. A. (1999). *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahlail. S. (2012). *Tafsir Kependidikan: Menelusuri Jejak Kisah al-Khadlir dalam al-Qur'an*. Jawa Tengah: MASEIFA Jendela Ilmu.
- MD. M. M. (2010). *Gus Dur Islam, Politik, dan Kebangsaan*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Muhtarudin. I. (2018). “Hubungan Islam dengan Demokrasi di Indonesia (Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid)”. *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mul Khan. A. M. (2010). *Perjalanan Politik Gus Dur*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Nasrulloh. L & Zulkarnain. (2023). “Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. *Jurnal Al-Riwayah*. 15 (2).
- Q.S. Al-Imran [3]: 159.
- Q.S. al-Isra' [17]: 24.
- Q.S. al-Syura [42]: 38.
- Q.S. al-Zariyat [51]: 56.
- QS. Asy-Syura [42]: 38.
- Rasyidin. A. (2008). *Falsafah Pendidikan Islami*. Citapustaka Media Perintis.
- Romlah. S. (2018). “Demokrasi Pendidikan Islam”. *Jurnal Studi Islam*. 12 (2).
- Rosyad. A. M. (2020). “Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Islam*. 3 (1).

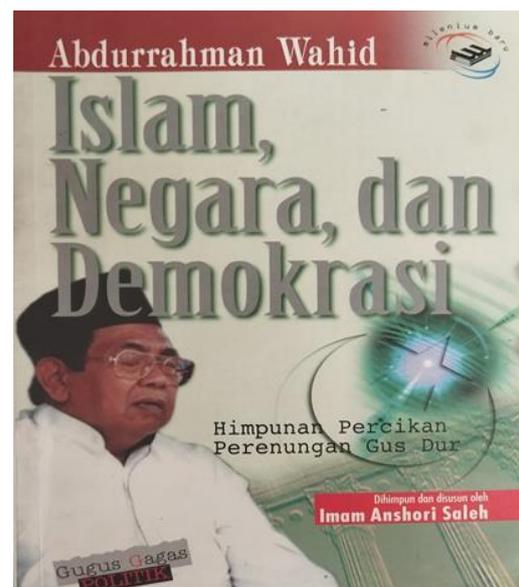
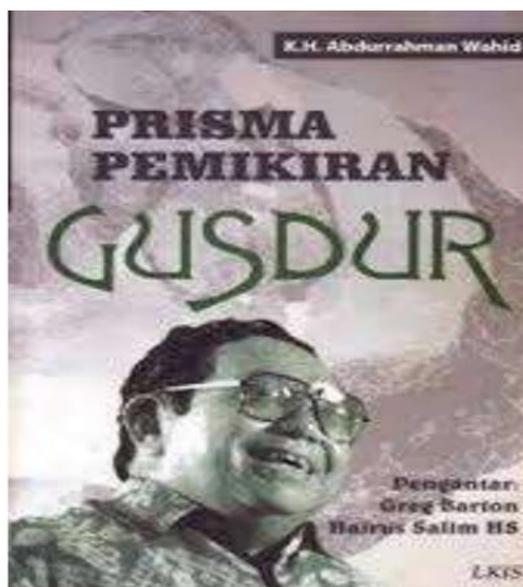
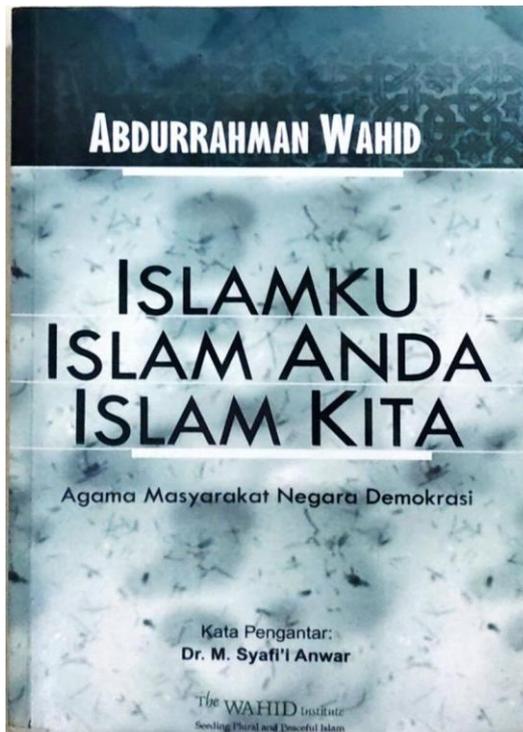
- Sahfutra. S. A. (2014). "Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur untuk Kesetaraan dan Kerukunan". *Jurnal Religi*. 10 (1).
- Salampessy. M., dkk. (2023). *Dinamika Demokrasi Abad 21*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Saleh. I. A. (1999). *Islam Negara dan Demokrasi*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Salik. I. A & Mohammad. S. (2021). "Pendidikan Toleransi antar Umat Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam (Menelusuri Pemikiran Gus Dur)", *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. 4 (2).
- Sari. D. (2023). "Pendidikan Islami Perspektif KH. Abdurrahman Wahid". *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sedarmayanti & Syaiful. H. (2003). *Metode Penelitian*. Bandung: Penerbit Bandar Maju.
- Shihab. M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Siswanto, M. & M. Anas. F. (Juni 2022). "Islam Kosmopolitan Gus Dur dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia", *Jurnal of Islamic Thought and Philosophy*. 1 (1).
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandar. A. A & Muhammad. H. (2020). *Pemikiran Pendidikan Islam: Sumbangan Para Tokoh Pendidikan Islam Melalui Gagasan Teori, dan Aplikasi*. Bandung: CV. Cendekia Press.
- Suryadi. A. (2010). *Pemikiran Pendidikan Islam Fazlur Rahman*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Tania. P. (2019). "Perspektif Abdurrahman Wahid Terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia". *Skripsi*. UIN Raden Intan Lamung.
- Taufik. M., dkk. (2020). "Islam dan Demokrasi". *Jurnal Studi Pengetahuan Sosial*. 1 (1).
- Wahid. A. (1999). *Islam, Negara dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.
- Wahid. A. (2000). *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKIS.

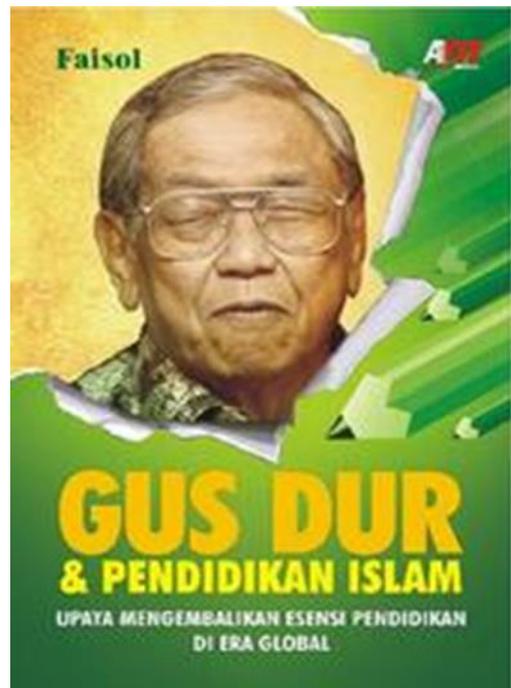
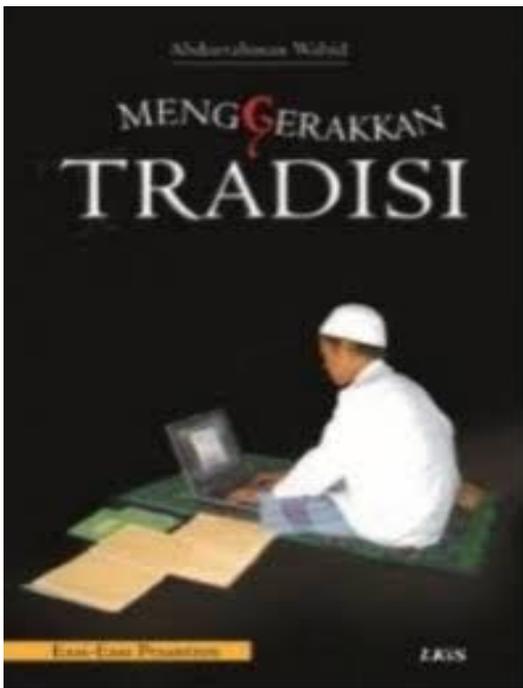
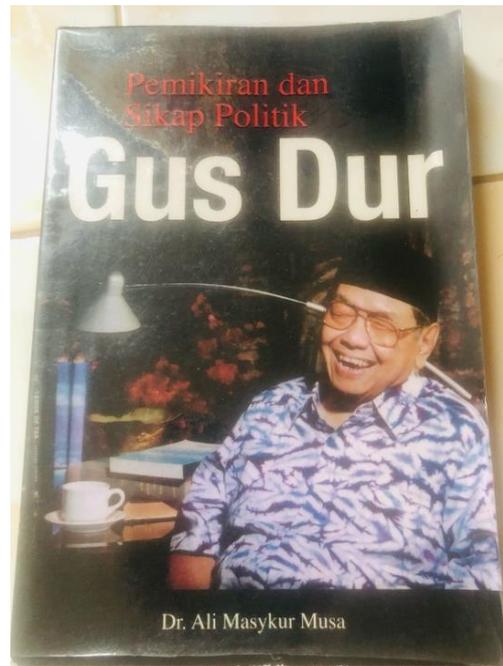
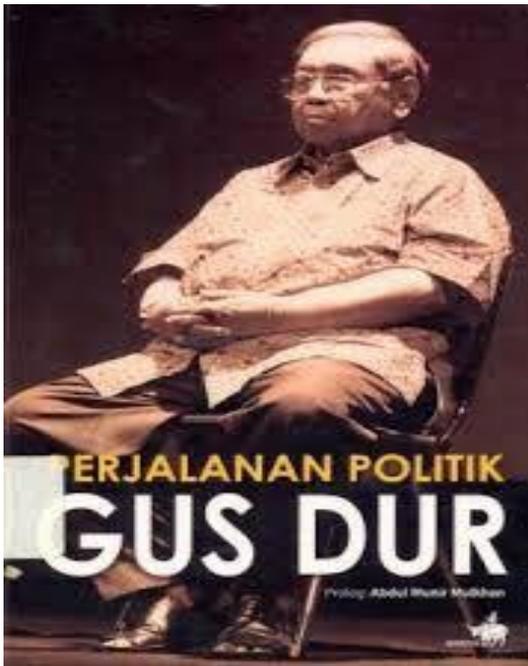
Wildah. N. I & M. S. (2020). “Membumikan Konsep Etika Islam dan Relevansinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Telaah Pemikiran Transformatif Abdurrahman Wahid). *Jurnal Staiarrosyid*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

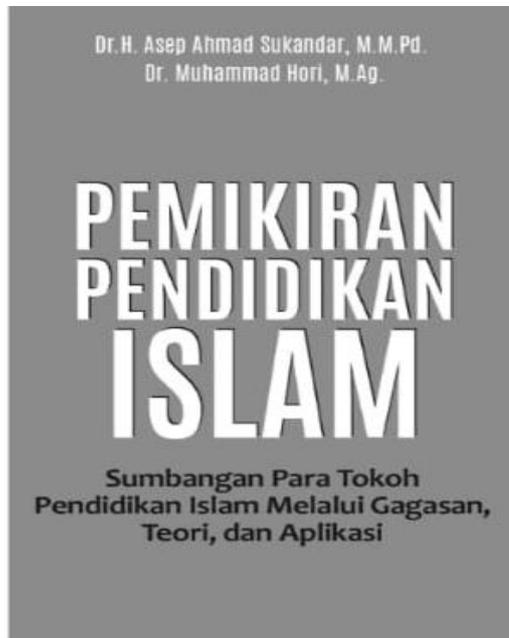
DOKUMENTASI TENTANG PENDIDIKAN DEMOKRASI ISLAMI MENURUT KH. ABDURRAHMAN WAHID

A. Sumber Data Primer





B. Sumber Data Skunder



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Risky Prisal Aditya
2. NIM : 2020100233
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 11 Oktober 2002
5. Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Pelajar
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jl.SM RAJA NO 481 Kelurahan Aek Habil
Kecamatan Sibolga Selatan
10. Telp. Hp : 082264280209
11. E-mail : riskyprisaladitya10@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Mirsal
 - b. Pekerjaan : TNI/POLRI
 - c. Alamat : -
 - d. Telp. Hp : -
2. Ibu
 - a. Nama : Apriani Hutabarat
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Jl.SM RAJA NO 481 Kelurahan Aek Habil
Kecamatan Sibolga Selatan
 - d. Telp. Hp : 081263050467

III. PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 084082Sibolga, Kota Sibolga Tamat Tahun 2014
2. SMP : MTs PTh Darur Rachmad Sibolga Tamat Tahun 2017
3. SMA : MAS PTh Darur Rachmad Sibolga Tamat Tahun 2020
4. S.1. : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

IV. ORGANISASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

07 Mei 2024

Nomor : B 1430/Un.28/E.1/PP. 00.9/05/2024
Lamp : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth:

1. **Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe, S.Ag.**
2. **Dr. Hj. Nahriyah Fata, S.Ag., M.Pd.**

(Pembimbing I)
(Pembimbing II)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, melalui surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen bahwa berdasarkan usulan dosen Penasehat Akademik, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Risky Prisal Aditya
Nim : 2020100233
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Pendidikan Demokrasi Menurut Gusdur

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor 400 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Tadris/Pendidikan Matematika, Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan ini kami menunjuk Bapak/Ibu Dosen sebagaimana nama tersebut diatas menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II Penelitian Skripsi Mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Dosen mengucapkan terima kasih.

Mengetahui

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi, M.A
NIP.19801224 200604 2001

Ketua Program Studi PAI

Dr. Abdusima Nasution, M. A
NIP.197409212005011002